

**Bidang Infrastruktur dan  
Kewilayahann**

**LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN MONITORING DAN  
EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**2023**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur disampaikan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur telah selesai dilaksanakan.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, 30 Desember 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



**Rahmi Laila, S.Si, M.Si**  
**NIP. 19810119 200604 2 003**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah harus mampu untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemen yang efektif dan efisien. Tahapan dalam proses antara lain adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan tersebut diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. pengaturan yang terpisah ini memunculkan masalah keterlepaskaitan antara perencanaan dan penganggaran.

Pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dokumen RPKD merupakan breakdown dari RPJMD dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan Pemerintah.

Capaian – capaian target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagai mana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sementara itu evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan. Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi proyek, progress yang dicapai pada proyek tersebut sampai kepada dampak dan efek dari adanya proyek tersebut.

Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai Visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga memerlukan data dan informasi yang berkualitas untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Terkait dengan kebijakan pemerintah bahwa Pemerintah memastikan ketersediaan

anggaran untuk mempercepat pencapaian program strategis nasional dan program strategis Daerah. Postur APBD 2023 diubah untuk mengakomodasi upaya pemerintah tersebut dengan merealokasi kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan, Belanja Barang yang tidak mendesak (perjalanan dinas, biaya rapat, penyelenggaraan event, honorarium, dan belanja operasional), Belanja Modal untuk kegiatan yang bukan prioritas dan belum ada perikatan (masih diblokir, masih dalam proses tender, sisa lelang), maka dilakukan refocusing terhadap sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

## **1.2. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

- Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
  - 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
  - 11) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
  - 12) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);

### 1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

**Tujuan** dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

1. Untuk perumusan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan Infrastruktur serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program yang sedang berjalan.
2. Teridentifikasinya seluruh potensi dan permasalahan pembangunan pengembangan infrastruktur,
3. Untuk mengumpulkan informasi dan data termutakhir yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan peningkatan koordinasi program pembangunan.

**Sasaran** dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah :  
Termonitornya pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan pengembangan infrastruktur, untuk penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya.

#### 1.4. Hasil Kegiatan

Akhir hasil dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2023 adalah :

1. Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur.
2. Tersusunnya laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2023.

#### 1.5. Lingkup Kegiatan

Lingkup wilayah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah Tahun 2023 adalah pada seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota. Dan untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi secara terpadu dan sinergis ditempuh upaya-upaya antar lain :

1. Melakukan koordinasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait pelaksana program dan kegiatan di provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Pengumpulan, mengolah dan menganalisa data informasi lapangan yang didapatkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
3. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD terkait dan Kab/kota pelaksana.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I** **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan.
- BAB II** **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**, berisi mengenai uraian ringkas hasil pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- BAB III** **Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan**, menguraikan beberapa permasalahan pokok dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- BAB IV** **Penutup**, penutup berupa kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

## BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur Provinsi Barat, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah melaksanakan koordinasi dan monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur dengan OPD Teknis terkait. Beberapa kegiatan yang telah dikoordinasikan/difasilitasi antara lain:

### **Monitoring dan Evaluasi Terpadu Progres Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur ke Kabupaten/Kota**

#### **Rapat Koordinasi Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi TA 2023 Pada Tanggal 13 Januari 2023**

Poin penting yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi ini, yaitu:

1. Data Indikator Kinerja Utama Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Data Indikator Kinerja Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3. List Kebutuhan Dana Infrastruktur
4. Objek Monitoring dan Evaluasi
5. Dasar Pemilihan Objek Monitoring dan Evaluasi
6. Jadwal Monitoring dan Evaluasi

Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rapat ini berupa capaian IKU, IKD dan Progul tahun 2022, Monitoring pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan rencana usulan Program / Kegiatan tahun 2024, akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Dimana pada tanggal 25 Januari 2023 akan dilaksanakan Konsultasi Publik penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Untuk itu, diharapkan seluruh SKPD lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan dapat memberikan informasi dan data yang valid terkait poin-poin diatas.

#### **1. Dinas SDABK**

Dinas SDABK memiliki 3 (tiga) target Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Ketiga target indicator tersebut adalah:

##### **a. Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)**

Pada tahun 2021, realisasi peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Provinsi Sumatera Barat mencapai 70,62% dari target sebesar 68,8%. Dan di tahun 2022 dari target sebesar 70,36%, dapat terrealisasi sebesar 71,06%.

##### **b. Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)**

Pada tahun 2021, realisasi peresentase volume tampungan sumber-sumber air Provinsi Sumatera Barat mencapai 58,5% dari target sebesar 52,28%. Dan di tahun 2022 dari target sebesar 53,78%, dapat terrealisasi sebesar 58,73%.

c. Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)

Pada tahun 2021, realisasi persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di Provinsi Sumatera Barat mencapai 65,66% dari target sebesar 64,75%. Dan di tahun 2022 dari target sebesar 66,51%, dapat terrealisasi sebesar 66,90%.

Untuk Lokasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2023, Dinas SDABK akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan bidang-bidang terkait lokasi dan jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Mengingat sebagian besar kegiatan baru akan dimulai pada triwulan II tahun 2023.

Sementara itu, terkait kebutuhan data infrastruktur juga akan dilengkapi lebih lanjut berupa data spasial dan dan polygon berupa peta sebaran Daerah Irigasi kewenangan Provinsi terbaru dalam format SHP paling lambat tanggal 17 Januari 2023.

## 2. Dinas BMCKTR

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian sebagai berikut:

a. Kematapan Jalan

Tahun 2021, Rasio Kematapan Jalan Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 75,034%. Namun seiring dengan dilakukannya survey kematapan jalan melalui PKRMS tahun 2022 serta diterbitkannya SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Ruas Jalan Yang Manjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada awal tahun 2023, terjadi penurunan angka Kematapan Jalan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan beberapa ruas jalan baru dengan kondisi kematapan yang masih sangat rendah serta terjadinya penurunan Kematapan Jalan pada beberapa ruas yang disebabkan oleh minimnya anggaran untuk penyelenggaraan jalan pada tahun 2022. Dari target Rasio Kematapan Jalan tahun 2022 sebesar 75%, hanya terrealisasi sebesar 71,68%.

Untuk itu BMCKTR Provinsi Sumatera Barat berharap ada perubahan target Rasio Kematapan Jalan dalam RPJMD karena alasan-alasan diatas. Dan untuk SK Jalan Provinsi yang terbaru akan disampaikan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar dalam perubahan penetapan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

b. Akses Air Minum (%)

Untuk indikator Akses Air Minum (%) tahun 2022, dari target sebesar 82% dapat terrealisasi 82,05%.

c. Akses Sanitasi Layak (%)

Untuk indikator Akses Sanitasi Layak (%) tahun 2022, dari target sebesar 82% dapat terrealisasi 82,26%.

d. Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%).

Target Indikator Kinerja Utama Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%) tidak dapat tercapai. Dimana dari target 40,22%, hanya terrealisasi sebesar 6%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran (KDP).

e. Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%).

Untuk capaian target Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan Bidang Penataan Ruang BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

Untuk rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga

Untuk tahun 2023, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan pada Dinas BMCKTR berupa kontraktual (22 paket) dan swakelola. Untuk penetapan lokasi monev yang akan dilaksanakan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penetapan lokasi monev, diantaranya terkait jalur alternatif menghadapi mudik lebaran 2023 dan ruas-ruas strategis lainnya diantaranya:

- ✓ Ruas Manggopoh-Padang Luar yang ditargetkan sebagai alternatif menghadapi mudik lebaran tahun 2023 dan ditargetkan pelaksanaan pekerjaan telah dimulai pada triwulan I tahun 2023 ini.
- ✓ Ruas Padang Koto Gadang - Palambayan
- ✓ Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka
- ✓ Ruas Singkarak Aripan - Tanjung Balit
- ✓ Rekonstruksi Sitangkai - Tanjung Ampalu
- ✓ Ruas Sicincin - Kurai Taji

b. Bidang Ciptakarya: Monev direncanakan untuk pekerjaan pembangunan Pabrik Penggilingan Jagung. Namun saat ini kegiatan tersebut masih menunggu keputusan lebih lanjut pada bulan Februari 2023.

Untuk kebutuhan data infrastruktur akan dilengkapi lebih lanjut berupa data spasial dan polygon dalam format SHP paling lambat tanggal 17 Januari 2023.

### 3. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Rasio Konektivitas. Rasio Konektivitas Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 tidak tercapai. Dari target 0,668, hanya terrealisasi sebesar 0,662. Hal ini disebabkan karena

adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang izin trayek, sehingga tidak dapat diketahui apakah jalur tersebut masih terlayani atau tidak.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah, yaitu:

- a. Rasio Konektivitas Provinsi. Dari target 0,668, hanya terrealisasi sebesar 0,662. Hal ini disebabkan karena adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak, hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas.
- b. Kinerja lalu lintas provinsi. Target dari indikator ini sudah tercapai, namun masih sangat rendah. Dari terget 0,52, dapat tercapai diangka 0,53. Hal ini disebabkan karena:
  - Banyaknya angkutan umum yang tidak beroperasi yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi, hal ini juga disebabkan karena masih banyaknya angkutan yang belum memperpanjang KP, maupun izin trayek
  - Berdasarkan data pemeriksaan laik jalan dapat diketahui masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga Ketika diperjalanan dapat menghambat kinerja lalu lintas yang ada
- c. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang). Dari target 19.000.000 penumpang, terrealisasi sebesar 18.650.012 orang. Dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala di lapangan diantaranya:
  - Adanya angkutan umum yang tidak beroperasi, sehingga menyebabkan tidak terdatanya penumpang di terminal, kemudian adanya naik turun penumpang yang dilakukan di luar Terminal sehingga tidak terdata penumpang yang naik dan turun di terminal
  - Adanya pelaksanaan razia gabungan sehingga angkutan umum tersebut melakukan penyimpangan trayek dan tidak melalui terminal penumpang Tipe B
  - Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum

Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi triwulan I tahun 2023, belum ada kegiatan fisik yang memungkinkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Untuk itu, Dinas Perhubungan berharap Bapak Gubernur dapat ikut terlibat dalam Rapat Koordinasi Dinas Perhubungan Se Sumatera Barat dan Rapat Forum LLAJ untuk memberikan penekanan dalam upaya peningkatan kinerja perhubungan.

Program Unggulan Dinas Perhubungan tahun 2022 terdapat beberapa progul yang tidak terrealisasi diantaranya:

- a. Penyusunan Rencana Induk Jalan (RIJ) pada tahun 2022 tidak terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Dimana, untuk penyusunan Rencana Induk Jalan (RIJ) ini dibutuhkan anggaran ± 1,5 milyar rupiah. Dari Dokumen RIJ tersebut dapat diketahui berbagai informasi terkait konektivitas provinsi Sumatera Barat seperti Perjalanan Rata-Rata Masyarakat Sumatera Barat Per Hari, Peta Sebaran Kecelakaan, Data pendistribusian dan pergerakan orang dan barang di Sumatera Barat, dll.
- b. Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menganggarkan pekerjaan penyusunan FS Penyeberangan Sinakak dan FS Pelabuhan Laut Sinakak. Namun setelah dikoordinasikan ke kementerian Perhubungan, anggaran penyusunan FS Sinakan ini tidak mencukupi, sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Untuk tahun 2023 FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak telah dianggarkan pada DIPA Kementerian Perhubungan karena hal ini telah tertera dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan. Sementara untuk FS Pelabuhan Laut Sinakak, Dinas Perhubungan merencanakan untuk menganggarkan lagi di APBD tahun 2024.

#### 4. DLH

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memiliki 1 (satu) target Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Menurut data DLH Provinsi Sumatera Barat, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat hanya 72%, namun dalam sakatoplan targetnya mencapai 87,16%. Perbedaan ini terjadi karena adanya perubahan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup oleh Kementerian LHK dari 3 indikator menjadi 5 indikator penilaian. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi:

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25
Realisasi		75,57				

Jika menggunakan 3 indikator penilaian, maka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah 81,15%. Namun jika menggunakan 5 indikator, maka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat hanya 75,57, dan berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Untuk triwulan I tahun 2023, belum ada pekerjaan yang dapat dilakukan monitoring dan evaluasi karena kegiatan fisik baru akan di mulai pada triwulan II tahun 2023. Sementara untuk data spasial dan polygon akan segera disampaikan ke Bappeda

Provinsi Sumatera Barat.



### **Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tanggal 15 Juni Tahun 2023**

Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Sumatera Barat, Ibu Rahmi Laila, S.Si, M.Si. Dalam pembukaannya, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi capaian kinerja (IKU, IKD dan Progul) yang telah dilakukan sebelumnya oleh bidang P2EPD. Dimana hasil verifikasi tersebut telah di input ke dalam aplikasi Sakatoplan. Namun saat dilihat pada aplikasi Sakatoplan, masih terdapat capaian kinerja yang belum terisi. Untuk itu diminta kepada SKPD untuk memberikan informasi terkait capaian IKU, IKD dan Progul per 31 Mei 2023 serta progress pelaksanaan kegiatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian IKU, IKD dan Progul.

Indikator Kinerja Utama di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 12 indikator. Dimana pada tahun 2022, dari 12 indikator tersebut 6 (enam) diantaranya dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara 6 (enam) indikator lainnya masih di bawah target yang telah ditetapkan.

#### **1. Dinas SDABK**

Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab Dinas SDABK yaitu:

- a. Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%). Dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 71,92% dan realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai 71,26%.
- b. Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%). Dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 55,28% dan target pada Perjanjian Kinerja Kepala SKPD sebesar 58,78% telah terrealisasi sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai 59,06%.
- c. Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%). Dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 68,27% dan realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai 67,07%.

Dari ketiga indikator tersebut diatas, diperkirakan pada akhir tahun anggaran 2023 seluruh Indikator Kinerja Utama ini dapat tercapai. Bahkan untuk Indikator Kinerja “Persentase Volume tampungan sumber-sumber air” kondisi saat ini capaiannya sudah jauh diatas target yang telah ditetapkan. Sehingga Dinas SDABK menetapkan target yang lebih tinggi dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD.

Sementara untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD), Dinas SDABK memiliki 5 (lima) target Indikator kinerja Daerah yaitu:

- a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%). Dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 0,69% dan realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai 0,14%.
- b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%). Dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 0,83% namun rasio ini saat ini belum dapat diukur karena masih dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan.
- c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%). Dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 0,19% dan realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai 0,55%.
- d. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%). Dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 11,11% dan realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai 0,35%.

- e. Persentase volume tampungan sumber-sumber air. Dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 55,28% dan realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai 59,06%.

Untuk Program Unggulan, target Dinas SDABK berada pada Program Sumbar Berkeadilan dengan target “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan” dengan indicator “Jumlah jaringan irigasi Provinsi yang direhab (meter)”, dimana target untuk tahun 2023 adalah 9.125 meter dengan realisasi per 31 Mei 2023 adalah 2.311,8 meter.

Pada bulan Mei 2023 masih terdapat 8 (delapan) paket pekerjaan yang masih dalam proses pengadaan. Sementara 21 paket PL telah selesai pelaksanaan pekerjaannya. Secara keseluruhan, target-target yang telah ditetapkan diperkirakan akan dapat direalisasikan pada akhir tahun anggaran 2023.

## 2. Dinas BMCKTR

Terdapat 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab Dinas BMCKTR yaitu:

- a. Rasio Kemantapan Jalan (%). Dimana target kemantapan jalan tahun 2023 adalah sebesar 77%, namun realisasinya saat ini hanya 66%. Hal ini disebabkan karena diterbitkannya SK Kewenangan Jalan yang baru, dimana terdapat 7 ruas jalan baru dengan kondisi kemantapan yang sangat rendah (jalan tanah). Selain itu, target peningkatan Kemantapan Jalan 2% per tahun dinilai terlalu tinggi karena dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk dapat meningkatkan Kemantapan Jalan 2% pertahun serta mempertahankan kemantapan jalan yang sudah ada.
- b. Akses Air Minum (%) dengan target 84% pada tahun 2023 sudah terealisasi 85,23%. Data realisasi ini berdasarkan data BPS tahun 2022. Sementara berdasarkan perhitungan Dinas BMCKTR, capaian akses air minum per 31 Mei 2023 mencapai 83,78%.
- c. Akses Sanitasi Layak (%) dengan target 84% pada tahun 2023 baru terealisasi 69,27. Data realisasi ini berdasarkan data BPS tahun 2022. Sementara berdasarkan perhitungan Dinas BMCKTR, capaian akses air minum per 31 Mei 2023 mencapai 83,08%.
- d. Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%) dengan target 55,55%, namun untuk tahun 2023 realisasi untuk target ini belum dapat dihitung. Selain itu target bangunan strategis yang terbangun menurut RPJMD adalah sebanyak 18 unit

bangunan hingga tahun 2026. Sementara anggaran yang tersedia setiap tahunnya tidak memungkinkan untuk pencapaian target IKU ini. Untuk itu dirasa perlu untuk dilakukan kaji ulang terhadap target ini. Selain itu penganggaran dan pelaksanaan pembangunan gedung biasanya dilakukan secara bertahap. Sehingga target ini baru dapat menjadi realisasi pada saat bangunan telah selesai secara keseluruhan, contohnya pembangunan gedung budaya Stadion Utama Sumbar yang dilakukan secara bertahap.

- e. Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%) dengan target 87%. Namun untuk saat ini realisasinya belum dapat dihitung karena saat ini tengah dilakukan penyusunan RTRW yang baru.

Penetapan target yang terlalu tinggi, menjadi factor utama tidak tercapainya IKU pada Dinas BMCKTR. Hal ini diperparah dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan, karena pencapaian IKU pada Dinas BMCKTR sangat bergantung pada besaran alokasi anggaran. Dimana dari hasil evaluasi SAKIP Dinas BMCKTR tahun 2022, diperoleh nilai CC karena tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas BMCKTR berharap target-target kinerja yang telah ditetapkan ini dapat dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan capaian kondisi saat ini serta kemampuan keuangan daerah dalam pencapaian target. Terkait tingginya target kinerja pada RPJMD ini, tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Untuk itu, Fungsional Perencana Ahli Muda Bpk. Hamdi Irza, ST,MT menyarankan agar target tahunan pada RKPD saja yang di perbaiki, walaupun nanti pada saat evaluasi RPJMD target ini akan menjadi catatan.

Sementara untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD), Dinas BMCKTR memiliki 7 target, diantaranya:

- a. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%) dengan target tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya saat ini belum dapat diukur karena masih dalam proses awal pelaksanaan kegiatan.
- b. Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional dengan target tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi per 31 Mei 2023 sebesar 82,26%.
- c. Rasio Kemantapan Jalan (%). Dimana target kemantapan jalan tahun 2023 adalah sebesar 77%, namun realisasinya saat ini hanya 66%. Hal ini disebabkan karena diterbitkannya SK Kewenangan Jalan yang baru, dimana terdapat 7 ruas jalan baru dengan kondisi kemantapan yang sangat rendah (jalan tanah). Selain itu, target peningkatan Kemantapan Jalan 2% per tahun dinilai terlalu tinggi karena

dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk dapat meningkatkan Kemantapan Jalan 2% pertahun serta mempertahankan kemantapan jalan yang sudah ada. Peningkatan kemantapan jalan 2% artinya Pemerintah Provinsi harus melakukan peningkatan jalan sepanjang 30 Km/tahun dengan kebutuhan biaya mencapai 270 milyar. Selain itu untuk mempertahankan kemantapan jalan yang ada sepanjang 1.600 km dibutuhkan anggaran 40 milyar/tahun. Artinya untuk mencapai target peningkatan kemantapan jalan 2%/tahun dibutuhkan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebesar 310 Milyar/tahun. Data ini lah yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan target Kemantapan Jalan kedepannya.

- d. Akses Air Minum Layak (%) dengan target 84% pada tahun 2023 sudah terealisasi 85,23. Data realisasi ini berdasarkan data BPS tahun 2022. Sementara berdasarkan perhitungan Dinas BMCKTR, capaian akses air minum per 31 Mei 2023 mencapai 83,78%.
- e. Akses Sanitasi Layak (%) dengan target 84% pada tahun 2023 baru terealisasi 69,27. Data realisasi ini berdasarkan data BPS tahun 2022. Sementara berdasarkan perhitungan Dinas BMCKTR, capaian akses air minum per 31 Mei 2023 mencapai 83,08%.
- f. Persentase penataan bangunan pada Kawasan strategis (%) dengan target tahun 2023 adalah 40% dan saat ini baru terrealisasi 2,5%.
- g. Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%) dengan target 87%. Namun untuk saat ini realisasinya belum dapat dihitung karena saat ini tengah dilakukan penyusunan RTRW yang baru.

Sementara untuk Program Unggulan, Dinas BMCKTR tahun 2023 memiliki 11 target namun saat ini yang sudah dapat dihitung realisasinya adalah Persentase terbangunnya Stadion Utama Sikabu (%) dengan target 60% dan saat ini telah terealisasi 40,1%.

### 3. Dinas Perhubungan

Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terkait capaian kinerja baik IKU, IKD maupun Program Unggulan secara umum tidak ada kendala yang berarti. Diperkirakan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 1 (satu) target kinerja yaitu Rasio Konektivitas dengan target tahun 2023 sebesar 0,676. Namun realisasi Rasio Konektivitas belum dapat diukur karena datanya bersifat kumulatif, dan baru dapat diukur pada akhir tahun anggaran. Pada tahun 2022 dari target 0,668 baru terrealisasi sebesar 0,662.

Sementara untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD), Dinas Perhubungan memiliki 3

target yaitu:

- a. Rasio Konektivitas dengan target tahun 2023 sebesar 0,676%, namun saat ini belum dapat diukur.
- b. Kinerja lalu lintas provinsi dengan target 0,5, dimana untuk saat ini rasion ini belum dapat diukur karena datanya bersifat kumulatif, dan baru dapat diukur pada akhir tahun anggaran. Untuk progresnya dari 11 ruas jalan provinsi yang akan diukur, saat ini telah selesai dilakukan pengukuran pada 6 lokasi dan diperkirakan kegiatan ini dapat selesai sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- c. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (ribu orang) dengan target 20.000.000 orang, dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah terealisasi sebanyak 4.358.000 orang penumpang.

Sementara untuk Program Unggulan, secara umum tidak ada kendala. Namun ada beberapa progul tahun lalu yang belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran, rencananya akan dilaksanakan pada tahun ini. Dinas Perhubungan Provinsi memiliki beberapa target ditahun 2023 diantaranya:

- a. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak (akumulasi) (unit) dengan target 2 unit dan telah terrealisasi 100% pada terminal Padang Panjang dan terminal Payakumbuh.
- b. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (unit) dengan target 2 unit dan saat ini baru terealisasi 1 unit di terminal Padang Panjang. Sementara pada terminal Painan belum dapat direalisasikan karena adanya perubahan titik lokasi pembangunan. Namun kegiatan ini diperkirakan dapat terealisasi 100% hingga akhir tahun anggaran.
- c. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak (unit) dengan target 1 unit pada terminal Padang Panjang. Saat ini pekerjaan tersebut baru pada tahap proses pengadaan.
- d. Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan (Pelabuhan) dengan target 4 pelabuhan dan telah terealisasi 100%.
- e. Persentase Realisasi Perkada tentang dokumen RIJLLAJ Provinsi (%) dengan target 100%. Namun kegiatan ini belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
- f. Jumlah terminal Type B yang beroperasi dan termanfaatkan dengan baik (unit) dengan target 5 terminal dan telah terrealisasi 100%.
- g. Jumlah dokumen perencanaan lingkungan Pelabuhan yang ditetapkan (dokumen) dengan target 2 dokumen dan saat ini belum terrealisasi. Kegiatan ini

berupa penyusunan Dokumen RIP Pelabuhan Penyebrangan Sinakak dan Dokumen DED Simalepet yang tersusun / Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak. Untuk DED Pelabuhan Simalepet, rencananya akan di susun oleh Kementerian Perhubungan. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta untuk melakukan Review FS Simalepet. Untuk itu Dinas Perhubungan telah mengajukan Nota Dinas untuk penambahan anggaran pada APBD Perubahan sebesar 350.000.000,- untuk Review FS ini. Apabila Review FS ini tidak tersedia, maka Kementerian Perhubungan tidak dapat merealisasikan pekerjaan fisik Pelabuhan Simalepet yang didanai melalui APBN dengan anggaran ± 60 Milyar rupiah.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Terdapat 1 target Indikator Kinerja Utama pada BPBD Provinsi Sumatera Barat yaitu: Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,5. Indeks ini baru dapat diukur dan ditetapkan BNPB pada akhir tahun 2023. Untuk tahun 2022 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah 0,64 dari target 0,49. Selain itu, BPBD Provinsi Sumatera Barat juga berharap Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi mediator untuk merangkul 10 SKPD yang terlibat dalam pengukuran Indeks Ketahanan Daerah seperti BPBD, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Kehutanan, DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pangan.

Untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD), terdapat 3 (tiga) target yang menjadi tanggung jawab BPBD, diantaranya:

- a. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%) dengan target tahun 2023 sebesar 43,7% dan realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 adalah sebesar 18,75%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini adalah keterbatasan anggaran. Selain itu target yang ditetapkan dalam RPJMD juga terlalu tinggi. Sehingga berpotensi tidak akan tercapai pada akhir tahun 2023.
- b. Persentase penanganan pra bencana dengan target tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100%.
- c. Persentase penanganan tanggap darurat bencana dengan target tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100%.

Sementara untuk Program Unggulan, BPBD Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 memiliki beberapa target namun anggarannya tidak tersedia. Adapun yang menjadi progul pada BPBD diantaranya:

- a. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada masyarakat (kali) dengan target 1 kali kegiatan di tahun 2023, dan target tersebut telah terrealisasi 100%.
  - b. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada satuan pendidikan aman bencana (kali) dengan target sebanyak 4 kali sosialisasi pada tahun 2023 dan saat ini belum terrealisasi.
  - c. Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (kelompok) dengan target sebanyak 10 kelompok pada tahun 2023 dan saat ini belum terrealisasi.
  - d. Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (nagari/desa) dengan target sebanyak 10 Nagari/Desa pada tahun 2023. Namun anggaran regular untuk kegiatan ini tidak ada. Yang tersedia saat ini hanyalah anggaran pikir destana untuk satu nagari di Kab. Dharmasraya. Selain itu juga ada anggaran dari BNPB berupa bantuan dana dari luar negeri berupa Desa Tangguh Bencana sebanyak 12 Nagari/Desa. Yang terdiri dari 6 nagari di Padang Pariaman dan 6 nagari di Pesisir Selatan.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perkimtan tidak memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU), namun memiliki beberapa target Indikator Kinerja Daerah (IKD) diantaranya:
- a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) dimana pada tahun 2023 ditargetkan terrealisasi 100%, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.
  - b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) ditargetkan terrealisasi 100%, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.
  - c. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani (%) dengan target 14,18%, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.
  - d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) dengan target 6%, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.
  - e. Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%) dengan target 34,51%, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.
  - f. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%) dengan target 2%, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.

- g. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%) dengan target 100%, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.
- h. Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota dengan target 2, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.
- i. Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%) dengan target 100%, namun sampai saat ini realisasinya belum dapat dihitung.

#### 6. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memiliki satu target Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target tahun 2023 sebesar 77,95%. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru dapat diukur pada akhir tahun anggaran. Namun sejak tahun 2022, terdapat metode perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baru yang mengakibatkan angka IKLH Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan.

Untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD), Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa target diantaranya:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dengan target tahun 2023 sebesar 77,95%. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru dapat diukur pada akhir tahun anggaran.
- b. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%) dengan target tahun 2023 sebesar 77%, dan realisasi baru dapat diukur pada akhir tahun.
- c. Persentase Sampah dan LB3 Terkelola dengan target 65% di tahun 2023, dan saat ini telah terrealisasi sebesar 12,78%.
- d. Persentase pengurangan sampah (%) dengan target tahun 2023 sebesar 19%, dan realisasi baru dapat diukur pada akhir tahun.
- e. Persentase penanganan sampah (%) dengan target tahun 2023 sebesar 58%, dan realisasi baru dapat diukur pada akhir tahun.
- f. Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun) dengan target 287.419 ton di tahun 2023, dan saat ini telah terrealisasi sebesar 74.101 ton.
- g. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapan lingkungan (%) dengan target 82% di tahun 2023, dan saat ini telah terrealisasi sebesar 91,12%.
- h. Persentase penurunan beban pencemaran (%) dengan target tahun 2023 sebesar 2,5%, dan realisasi baru dapat diukur pada akhir tahun.

- i. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%) dengan target 0,05% di tahun 2023, dan saat ini telah terrealisasi sebesar 0,023%.

Sementara untuk Program Unggulan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi memiliki beberapa target diantaranya:

- a. Jumlah dokumen DED dan AMDAL yang tersusun (dokumen) dengan target 1 Dokumen, namun saat ini realisasi masih nol.
- b. Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot (nagari/desa) dengan target 18 desa/nigari dengan realisasi masih nol.
- c. Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun) dengan target 287.419 ton di tahun 2023, dan saat ini telah terrealisasi sebesar 74.101 ton.
- d. Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi (Kabupaten/Kota) dengan target 18 Kab/Kota di tahun 2023, dan saat ini telah terrealisasi untuk 18 Kab/Kota.

#### 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki target Indikator Kinerja Utama. Sementara untuk target Indikator Kinerja Daerah (IKD), Dinas ESDM memiliki target diantaranya:

- a. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%) (catatan: Jika telah ada pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Provinsi) dengan target ditahun 2023 adalah sebesar 40% dengan realisasi sampai saat ini sebesar 16%.
- b. Persentase Desa yang teraliri listrik (%) dengan target ditahun 2023 adalah sebesar 100% dengan realisasi 100%.
- c. Rasio Elektrifikasi dengan target ditahun 2023 adalah sebesar 99,6% dengan realisasi 99,99%.
- d. Porsi EBT dalam bauran Energi (%) dengan target ditahun 2023 adalah sebesar 33,3% dengan realisasi sampai saat ini sebesar 29,28%.
- e. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%) dengan target ditahun 2023 adalah sebesar 55% dengan realisasi sampai saat ini sebesar 40%.

Sementara untuk capaian pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan masing-masing SKPD dapat dilihat dari table (terlampir).

## I. Dokumentasi



### **Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK) Monitoring dan Evaluasi Usulan Kegiatan Konreg PUPR 2023 Ke Kota Sawahlunto pada Tanggal 22 Februari 2023**

Hasil monitoring dan evaluasi ke Embung Lurah Bomben Kota Sawahlunto :

1. Kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengelola kebijakan sumber daya air di wilayahnya dalam upaya meningkatkan ketersediaan cadangan air untuk kebutuhan air baku, diwujudkan dengan melakukan konservasi sumber daya air;
2. Kegiatan konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Kegiatan konservasi sumber daya air dapat dilakukan pada cekungan air tanah atau daerah tangkapan air dengan membangun waduk atau embung;
3. Salah satu rencana dari kepedulian pemerintah dalam melakukan konservasi sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan cadangan air di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat melalui pembuatan Embung yang lokasinya terletak di Kota

Sawahlunto. Dengan adanya rencana pembangunan embung ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketersediaan air untuk keperluan irigasi disekitar lokasi, cadangan air bersih, dan menjadi salah satu alternatif daerah wisata.

4. Lurah Bomben mempunyai lahan seluas 5,9 hektar yang menurut rencana akan dijadikan lokasi pembangunan Embung Lurah Bomben di Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin berada pada kawasan hutan dan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi atau (HPK) berdasarkan peta indikatif pemberhentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2020.
5. Lurah Bomben saat ini : Lokasi berada di kaki bukit dengan ketinggian 365 m dpl, Kemiringan lahan  $\pm 10\%$ , Lokasi mengeluarkan air secara kontinu, Berupa peladangan yang diusahakan masyarakat, Berada pada batuan sedimen, yaitu anggota bawah formasi ombilin, berupa batupasir kuarsa

Kawasan Lurah Bomben ini adalah merupakan kawasan prioritas Pertanian Sentra Pangan dan *world heritage*

Latar belakang usulan pembangunan embung lurah bomben :

- Masih kurangnya ketersediaan air yang digunakan untuk suplai air baku
  - Sumber air yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara optimal
  - Lokasi rencana pembangunan berada di daerah cekungan yang memiliki potensi kapasitas tampung yang besar
  - Memiliki potensi menjadi kawasan wisata
6. Penempatan lokasi Embung Lurah Bomben hasil pengecekan di lapangan, maka tampak bahwa lokasi Embung berada di antara dua perbukitan. Sumber air di lokasi tersebut merupakan sungai kecil.

Lokasi Embung yang akan direncanakan terletak dikaki bukit dengan ketinggian 365 m diatas permukaan laut (dpl) dan dengan koordinat  $0^{\circ} 23' 38''$  -  $0^{\circ} 33' 54''$  LS dan  $100^{\circ} 18' 39''$  -  $100^{\circ} 26' 59''$  BT. Lokasi tersebut mengeluarkan air secara kontiniu.

Keadaan tutupan lahan di sekitar embung berupa peladangan yang diusahakan oleh masyarakat.

Spesifikasi Teknik Embung Lurah Bomben yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Tipe Embung = Gravity Dam
- b. Elevasi puncak = EL. 358.50 m
- c. Lebar mercu = 2.00 m
- d. Panjang mercu embung = 60.85 m
- e. Kapasitas tampungan embung = 62 ribu m<sup>3</sup> ,

- f. Luas genangan (muka air) = 17. ribu m<sup>2</sup>
  - g. Tinggi Embung dari pondasi = 16.85 m
  - h. Tampungannya sedimen = 2000 m<sup>3</sup>
  - i. Tipe Pelimpah = MDS
  - j. Elevasi Pelimpah = El. 356 m
  - k. Debit banjir rencana Q<sub>100</sub> = 9,81 m<sup>3</sup>/dt.
  - l. Intake direncanakan 1 buah.
  - m. Elevasi Intake Air Baku = El. 349,50 m
7. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan beberapa hal dan dukungan terkait dengan rencana pembangunan embung lurah bomben, yaitu :
- Lahan seluas 5,9 hektar yang menurut rencana akan dijadikan lokasi pembangunan Embung Lurah Bomben di Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin berada pada kawasan hutan dan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi atau (HPK) berdasarkan peta indikatif pemberhentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2020 dan surat dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Yoswardi tanggal 9 April 2021 tentang klarifikasi status kawasan hutan dan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB) lokasi rencana kegiatan pembangunan Embung Lurah Bomben di Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
  - FS tahun 2020, DED tahun 2020, Dokumen Lingkungan Tahun 2021 dan Lahan sudah bebas
  - Perkiraan Anggaran Biaya untuk pekerjaan SID Embung Lurah Bomben adalah sebesar Rp. 22.409.959.000,-
8. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pengusulan kegiatan Konreg PUPR 2023, Lurah Bomben merupakan salah satu usulan untuk pelaksanaan 2024 karena embung lurah bomben secara readiness criteria telah lengkap dan memberikan dampak yang sangat besar dalam pembangunan embung ini serta diperkirakan selesai pada Juni 2024.



**Monitoring pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada DI.  
Bandar Gadang II Paninjauan, Kab. Tanah Datar pada tanggal 13 September 2023**

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi serta untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

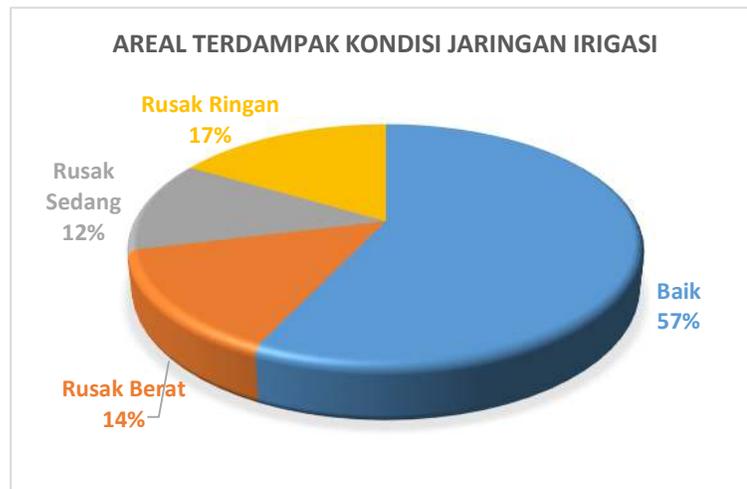
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan”**, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (%). Dimana untuk tahun 2022 capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Sumatera Barat telah mencapai 71,06% dari target RPJMD sebesar 70,36%. Dan pada tahun 2023 target Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Sumatera Barat adalah sebesar 71,92%.

Sementara untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi target indikator pada Dinas SDABK adalah Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%). Dimana untuk tahun 2022 ditargetkan Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah sebesar 4,03% dengan capaian 5,87%. Dan untuk tahun 2023 ditargetkan Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah sebesar 0,19%.

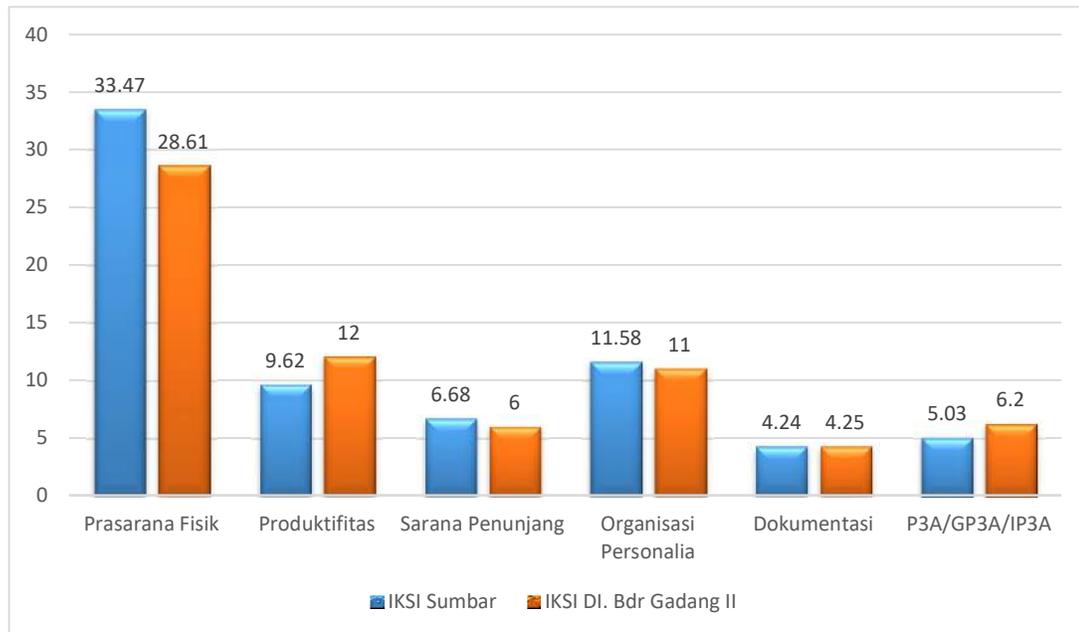
Untuk mencapai target IKU dan IKD tersebut, program utama yang harus dilaksanakan Dinas SDABK yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan salah satu Sub Keegiatannya adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Salah satu lokus pekerjaan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2023 adalah DI. Bandar Gadang II Paninjauan yang berada di Kab. Tanah Datar. DI Bandar Gadang II Paninjauan ini merupakan salah satu dari 65 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang melintasi dua Kab/Kota di Sumatera Barat yaitu Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. DI Bandar Gadang II Paninjauan memiliki luas daerah irigasi 352 Ha dengan Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi seluas 171 Ha. Dimana 97 Ha diantaranya dalam kondisi baik, 28 Ha dalam kondisi rusak ringan, 21 Ha dalam kondisi rusak sedang dan 24 Ha dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



### **3.1. Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi DI Bandar Gadang II Paninjauan**

Sementara berdasarkan data Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 diketahui bahwa nilai IKSI di Sumatera Barat telah mencapai 70,62%, sedangkan IKSI DI Bandar Gadang II Paninjauan baru mencapai 68,06% yang dinilai berdasarkan 6 indikator penilaian sebagaimana terlihat dalam diagram berikut:



### 3.2. Indeks Kondisi Sistem Irigasi Tahun 2023

Dari dua diagram diatas dapat diketahui bahwa kondisi Prasarana Fisik DI Bandar Gadang II Paninjauan masih butuh penanganan ekstra. Dimana 14% arealnya mengalami kerusakan berat dan 12 % mengalami rusak sedang. Sementara jika dilihat dari capaian ICSI Sumatera Barat diketahui bahwa Prasarana Fisik menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya ICSI DI. Bandar Gadang II Paninjauan jika dibandingkan dengan ICSI Sumatera Barat. Dimana capaian Prasarana Fisik DI Bandar Gadang II Paninjauan hanya 28,61% sementara capaian Prasarana Fisik DI Sumatera Barat adalah 33,47% dari nilai capaian maksimal 45%.

Mengingat pentingnya penanganan rehabilitasi jaringan irigasi ini, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selalu mengupayakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan ini, baik melalui dana APBD maupun melalui dana DAK Bidang Irigasi. Dan untuk Tahun 2023, Dinas SDABK menganggarkan Rp.33.270.541.820,- untuk sub kegiatan ini. Dimana Rp. 976.258.750,- diantaranya dianggarkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi DI Bandar Gadang II Paninjauan.

Dari hasil tender pengadaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan pemenang / pelaksana kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan DI Bandar Gadang II Paninjauan adalah CV. Bandar Mas dengan kontrak nomor: 04.12/PJPA-SDA.BK/APBD/VI-2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan nilai Rp. 643.753.000,-. Jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi ini adalah selama 120 hari kalender dan kontrak akan berakhir pada 26 Oktober 2023. Dimana pekerjaan yang dilakukan berupa rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan dinding penahan tabing serta rehabilitasi bendungan.

Dari hasil pantauan di lapangan bersama PPTK, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana, pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Bandar Gadang II Paninjauan ini telah mencapai bobot fisik  $\pm 81\%$ . Capaian bobot fisik pekerjaan ini sejalan dengan rencana target pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Saat ini pekerjaan rehabilitasi saluran dan pembangunan dinding penahan tebing telah selesai dilaksanakan dan hanya menyisakan pekerjaan minor pada beberapa titik. Sementara untuk pekerjaan rehabilitasi bendungan masih dalam proses pengerjaan. Dimana satu sisi bendungan telah selesai dikerjakan dan diperkirakan sebelum batas waktu berakhirnya kontrak, pekerjaan ini sudah dapat diserahkan.

Secara keseluruhan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigai DI Bandar Gadang II Paninjauan ini. Kondisi ini semakin menguntungkan mengingat tingginya animo dan dukungan dari masyarakat setempat khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) terhadap kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ini.

Pekerjaan rehabilitasi bendungan sempat terhenti beberapa waktu yang lalu karena tingginya curah hujan serta permukaan air di bendungan yang tinggi. Sehingga pekerjaan pemasangan dinding bendungan bagian kiri yang saat itu baru saja terpasang, kembali rusak dan terbongkar oleh arus air yang tinggi. Namun saat ini pekerjaan dinding dan lantai bendungan bagian kiri telah selesai dikerjakan dan hanya menyisakan dinding lantai bendung bagian kanan.

Mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air, maka diharapkan ada penanganan lebih lanjut untuk saluran jaringan irigasi ini. Karena sebagian saluran irigasi DI Bandar Gadang II Paninjauan ini masih berupa saluran tanah yang rawan rusak dan terban terutama pada saat curah hujan tinggi. Menurut perhitungan tenaga teknis Dinas SDABK diperkirakan dibutuhkan anggaran  $\pm$  Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) agar seluruh saluran tanah pada DI ini dapat tertangani.

## Dokumentasi

### 1. Saluran Tanah



### 2. Pembangunan Dinding Penahan Tebing dan saluran



### 2. Rehabilitasi Saluran Irigasi



### 3. Rehabilitasi Bendungan



## Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Di. Bandar Galo Gandang, Kab. Tanah Datar pada Tanggal 14 September 2023

Hasil monitoring dan evaluasi ke Daerah Irigasi Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar :

- 1) Daerah Irigasi Bandar Galo Gandang merupakan Daerah Irigasi Utuh Kabupaten Tanah Datar dan merupakan Irigasi teknis Kewenangan Provinsi berada pada Wilayah Pengamat II UPTD, Balai Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, dengan luas berdasarkan Permen PU sebesar 1.112 Ha, Luas Baku 466 Ha, Luas Potensial 4.664 Ha dan Luas Fungsional 466 Ha.
- 2) Tahun anggaran 2023 ini penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat untuk Daerah Irigasi Bandar Galo Gandang adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 2.510.494.000,-.
- 3) Paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bandar Galo Gandang yang dilaksanakan oleh CV Putra Chaniago berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :

04.06/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023 Tanggal 24 Maret Tahun 2023 Adendum/Amandemen I No.04.06/ADD.01/PJPA-SDA.BK/DAK/VI-2023 tanggal 8 Mei 2023, dan Adendum/ Amandemen II 04.06/ADD.02/PJPA-SDA.BK/DAK/VIII-2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar (DAK) dan Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023.

4) Progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan 14 September 2023 adalah 93,57% dengan persentase fisik pekerjaan sebesar 6,43%, dengan rincian sebagai berikut :

- Galian Tanah Biasa
- Pasangan Batu dengan Mortar Type N (setara camp 1 PC : 4 PP) – Manual 12,3 M<sup>3</sup> (0,50%)
- Pasangan Batu dengan Mortar Type N (setara camp 1 PC : 4 PP) – Manual, Batu Bekas Bongkaran 12,3 M<sup>3</sup> (0,01%)
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 SP 3 PP tebal 15 mm (0,40%)
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Acian Plesteran (0,23%)
- Bekisting beton dengan Multipleks 12 mm (2 x pakai) (0,10%)
- Pembesian dengan besi polos atau ulir (0,24%)
- Beton K 175 menggunakan manual (0,13%)
- Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat B = 0, 3 m, H = 0,5 m (1,33%)
- Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat B = 0, 5 m, (0,29%)
- Pengadaan dan Pemasangan Rumah Pelindung Pintu Air (0,32%)
- Pengadaan dan Pemasangan Plat Duga Papan Ukur Air (Pelischaal) Uk. AH.100 cm, B.14 cm (0,22%)
- Beton K 125 (0,71%)
- Timbunan didatangkan (0,58%)
- Pengadaan dan Pemasangan Papan Pasten (1,29%)



### **Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Batang Lampasi Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tanggal 18 September 2023**

Hasil monitoring dan evaluasi ke Daerah Irigasi Batang Lampasi Kabupaten Lima Puluh Kota :

- 1) Daerah Irigasi Batang Lampasi merupakan daerah irigasi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang alirannya melalui daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Bendungannya berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Nagari Sungai Beringin, untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, daerah yang dilewatinya yaitu Nagari Sungai Beringin, Piobang dan Koto Baru Simalanggang. Sedangkan untuk Kota Payakumbuh DI Batang Lampasi mengairi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Payakumbuh Barat. DI Batang Lampasi berada di Nagari Sungai Beringin Kabupaten Lima Puluh Kota, DI Batang Lampasi memiliki 2 intake, yaitu intake kiri dan Intake kanan, Intake kiri menuju Kabupaten Lima Puluh Kota, intake kanan menuju Kota Payakumbuh;
- 2) Daerah Irigasi Batang Lampasi dengan luas berdasarkan Permen PU Nomor 14 Tahun 2015 2.180 Ha, Luas Baku 1.574 Ha, Luas Potensial 1.754 Ha dan Luas Fungsional 1.335 Ha. Sumber air irigasi Batang Lampasi berasal dari Sungai Batang Lampasi yang mengalir dari Kabupaten Lima Puluh Kota menuju Kota Payakumbuh. Tipe bendungnya adalah tetap/ambang lebar yang memiliki dua intake, kiri dan kanan. Dimana intake kiri mengairi areal persawahan seluas 859 Ha yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Intake kanan mengairi areal persawahan seluas 1.321 Ha, yang sebagian besar berada di Kota Payakumbuh. Namun karena ada perubahan kebutuhan, terjadilah alih fungsi lahan yang membuat DI Batang Lampasi hanya mengairi 1.277 Ha (486 Ha untuk Kabupaten Lima Puluh Kota dan 791 Ha untuk Kota Payakumbuh);
- 3) Penggunaan air DI Batang Lampasi oleh masyarakat petani adalah untuk pemenuhan kebutuhan pertanian khususnya untuk tanaman padi, jagung, dan palawija lainnya yang di budidayakan.

Ketersediaan air irigasi di Batang Lampasi dipengaruhi oleh cuaca, apabila curah hujan tinggi maka debit air akan tinggi dan sebaliknya. Namun debit air tetap dikontrol melalui pengaturan pintu air oleh Petugas Penjaga Pintu Air.

Debit air rata – rata untuk intake kanan adalah 1.244 l/detik dan intake kiri sebesar

196,39 l/detik dengan total 1.421,16 l/detik. Ketersediaan air di petak sawah dipengaruhi oleh adanya kehilangan air di jaringan irigasi yang mencapai 10 – 30%. Tingginya kehilangan air di sebabkan kondisi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, seperti adanya kebocoran pada lantai dan dinding pasangan serta pengambilan air secara liar oleh petani dengan cara melobangi saluran sesuai dengan kebutuhan mereka dan menggunakan pompa air tanpa seizin petugas.

- 4) Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat penanganan yang dilakukan pada tahun 2023 ini adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi melalui dana aspirasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar dengan nilai kontrak Rp. 467.351.100,-;
- 5) Paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Lampasi dilaksanakan oleh CV Yoan Putra Pala berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 04.08/PJPA-SDA.BK/APBD/V-2023 Tanggal 18 Mei Tahun 2023 Adendum/Amandemen I No.04.08/ADD.01/PJPA-SDA.BK/APBD/VIII-2023 tanggal 7 Agustus 2023 dengan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Lampasi dengan waktu pelaksanaan 120 hari;
- 6) Progres pelaksanaan pekerjaan sampai temin 2 adalah 84,83% dengan sisa pekerjaan fisik 15,17% dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :
  - Galian Tanah Biasa (0,06%)
  - Pasangan Batu dengan Mortar Type N (setara camp 1 PC : 4 PP) – Manual 1,85%)
  - Pasangan Batu dengan Mortar Type N (setara camp 1 PC : 4 PP) – Manual, Batu Bekas Bongkaran (0,21%)
  - Bongkar Pasangan Batu dan Pembersihan Batu - Manual (0,12%)
  - Pasangan Pipa Suling - Suling (0,01%)
  - Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan (1,86%)
  - Pemasangan 1 m2 Plesteran 1 SP 3 PP tebal 15 mm (0,38%)
  - Pemasangan 1 m2 Acian (0,24%)
  - Bekisting beton dengan Multipleks 12 mm (2 x pemakaian) (0,84%)
  - Pembesian dengan besi polos atau ulir (4,6%)
  - Beton K 175 menggunakan manual (1,27%)
  - Beton menggunakan ready mix (mutu K.175) (4,03%)
  - Pengadaan dan Pemasangan Plastik (0,08%)

7) Permasalahan :

- Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Batang Lampasi ada Adendum 1 karena adanya perubahan kondisi lapangan yang mengakibatkan perubahan volume pekerjaan dengan tidak menambah nilai kontrak;
- Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan permasalahan/kendala yang berarti namun kontraktor tidak bekerja sesuai dengan *time schedule* yang ditetapkan karena kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan karena masalah keuangan kontraktor dalam penyediaan ready mix yang membutuhkan pembayaran cash kepada penyedia.
- Dari hasil peninjauan lapangan pada tanggal 18 September 2023 pada saluran pembawa juga terdapat saluran limbah rumah tangga dan saluran pembawa menuju Kota Payakumbuh berpotongan dengan saluran drainase jalan Kota Payakumbuh sehingga menimbulkan *back water effect* dan menindaklanjuti hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Payakumbuh terkait saluran yang berpotongan ini namun masih belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat melakukan Barat telah membuat langkah – langkah untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan secara berkala diantaranya pengendalian dan evaluasi dan rapat secara berkala dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan telah memberikan denda kepada kontraktor karena pekerjaan sesuai dengan kontrak sudah harus diserahkan pada tanggal 14 September 2023.



### Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lumbo Kab. Pesisir Selatan pada Tanggal 24 Oktober 2023

- Batang Lumbo merupakan salah satu sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kab. Pesisir Selatan. Secara keseluruhan Batang Lumbo memiliki panjang 17.701,20 meter yang terdiri dari beberapa klasifikasi diantaranya Sungai A Lumbo, Sungai BA Lumbo Kecil dan Bt. Aia Lumbo. Batang Lumbo ini bermuara ke Samudera Hindia, tepatnya di daerah Luhung-Pasar Baru Kab. Pesisir Selatan.



- Pada tahun 2023, Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat telah memilih Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sebagai salah satu upaya dalam pencapaian IKU “Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air” serta IKD “Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)” dan “Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%)” dengan total pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 19.365.435.513,- yang terdiri dari 26 paket pekerjaan yang tersebar di beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat, salah satunya adalah pembangunan bangunan perkuatan tebing Batang Lumbo dengan pagu Rp.1.189.538.186,-.
- Dari hasil lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh UKPBJ, ditetapkan CV. Fariz Duta Konstruksi sebagai rekanan pelaksana kegiatan dengan kontrak nomor: 04.15/PPSDA-SDABK/APBD/VI-2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan nilai kontrak Rp. 838.994.620,- dan addendum pekerjaan (CCO) nomor: 04.15/ADD.01/PPSDA-SDABK/APBD/VIII-2023 tanggal 7 Agustus 2023. Adapun output yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah berupa pemasangan batu pengaman tebing sepanjang 70 meter dengan waktu pengerjaan selama 120 hari kalender.

- Dari hasil pemantauan dilapangan, diketahui bahwa pekerjaan pembangunan bangunan tebing Batang Lumpo telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 11 September 2023 dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 04.15/BAST/PPSDA-SDABK/APBD/IX-2023. Kegiatan pembangunan bangunan tebing dilakukan dengan system Cable Stone atau Dump Stone (Batu Curah). Dimana system ini merupakan salah satu tipe bangunan pelindung sungai terhadap ancaman gerusan atau erosi oleh aliran air sungai. Bangunan ini berupa timbunan batu-batu yang berukuran relatif besar yang ditumpuk / dicurahkan dari atas tebing dan / atau disusun dari arah dasar sungai. Bangunan pelindung tebing ini relatif murah karena baik desain maupun pelaksanaan pembangunannya dikerjakan dengan cara yang sederhana. Sistem Dump Stone ini dipilih karena tingkat kadar garam pada air Batang Lumpo cukup tinggi. Sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan system batu bronjong, dimana kadar garam dapat mempercepat terjadinya kerusakan / karat pada kawat-kawat bronjong.
- Selama proses pelaksanaan kegiatan, relatif tidak ditemukan kendala yang berarti. Hanya saja akses jalan masuk yang kecil (jalan rigid beton) menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Namun hal tersebut dapat diatasi berkat kerjasama yang baik antara rekanan pelaksana dan masyarakat. Dimana masyarakat sekitar lokasi sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini mengingat tebing sungai yang sudah sangat dekat dengan permukiman warga akibat tergerus air sungai.



- Namun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, penanganan bangunan pengaman tebing di Batang Lumpo ini masih belum maksimal. Dimana pada titik penanganan saat ini masih terdapat tebing sungai berupa tanah yang sangat beresiko untuk terkena erosi, abrasi dan akresi sehingga diperkirakan masih dibutuhkan anggaran ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lagi agar tikungan luar pada titik ini dapat tertangani secara maksimal sepanjang ±150 meter. Untukantisipasi sementara dalam upaya mengurangi resiko erosi, abrasi dan akresi pada tikungan luar tersebut, Dinas SDABK melakukan pemancangan bambu seperti yang terlihat pada gambar berikut:



- Selain pada lokasi pekerjaan ini, juga terdapat beberapa titik tebing sungai Batang Lumpo yang telah mengalami penggerusan bahkan menyebabkan beberapa rumah mengalami kerusakan yang cukup berat. Dimana proses penggerusan ini telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir. Menurut informasi masyarakat sekitar, dahulunya tebing sungai berada  $\pm 10$  meter dari rumah masyarakat. Namun karena tingginya arus air dan penggerusan pada tikungan luar ini menyebabkan abrasi dan kerusakan pada rumah warga. Untuk itu diperlukan penanganan sesegera mungkin untuk menghindari resiko kerusakan bangunan masyarakat yang lebih parah. Diperkirakan pada lokasi ini dibutuhkan anggaran  $\pm$  Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lagi untuk pembangunan bangunan perkuatan tebing sepanjang  $\pm 250$  meter. Dan sebagai informasi tambahan pihak Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa SID Batang Lumpo ini sudah disusun dan dapat digunakan apabila anggaran penanganan telah tersedia.

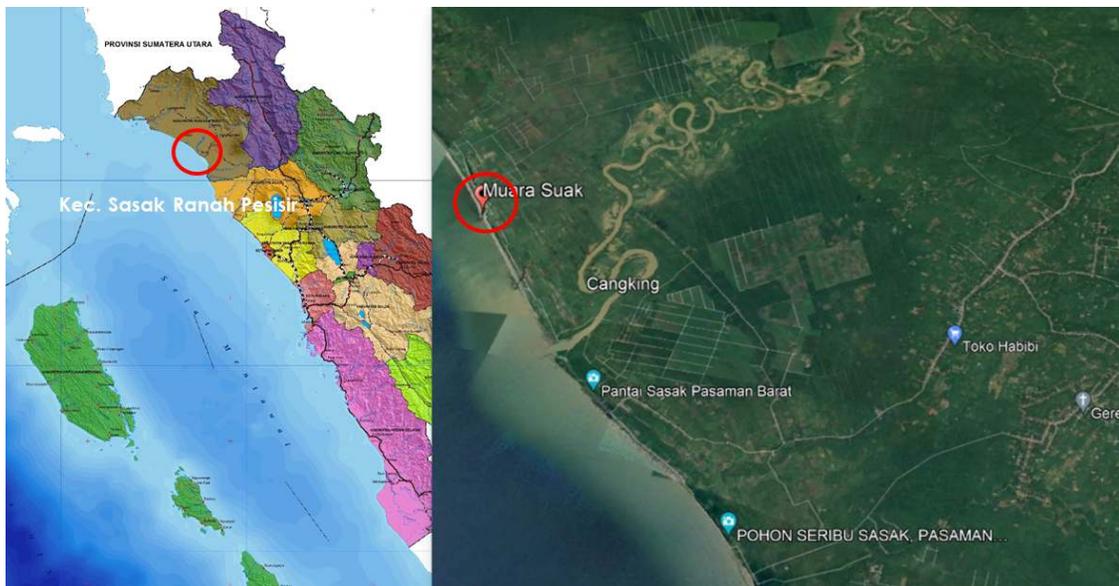


### Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 7 November 2023

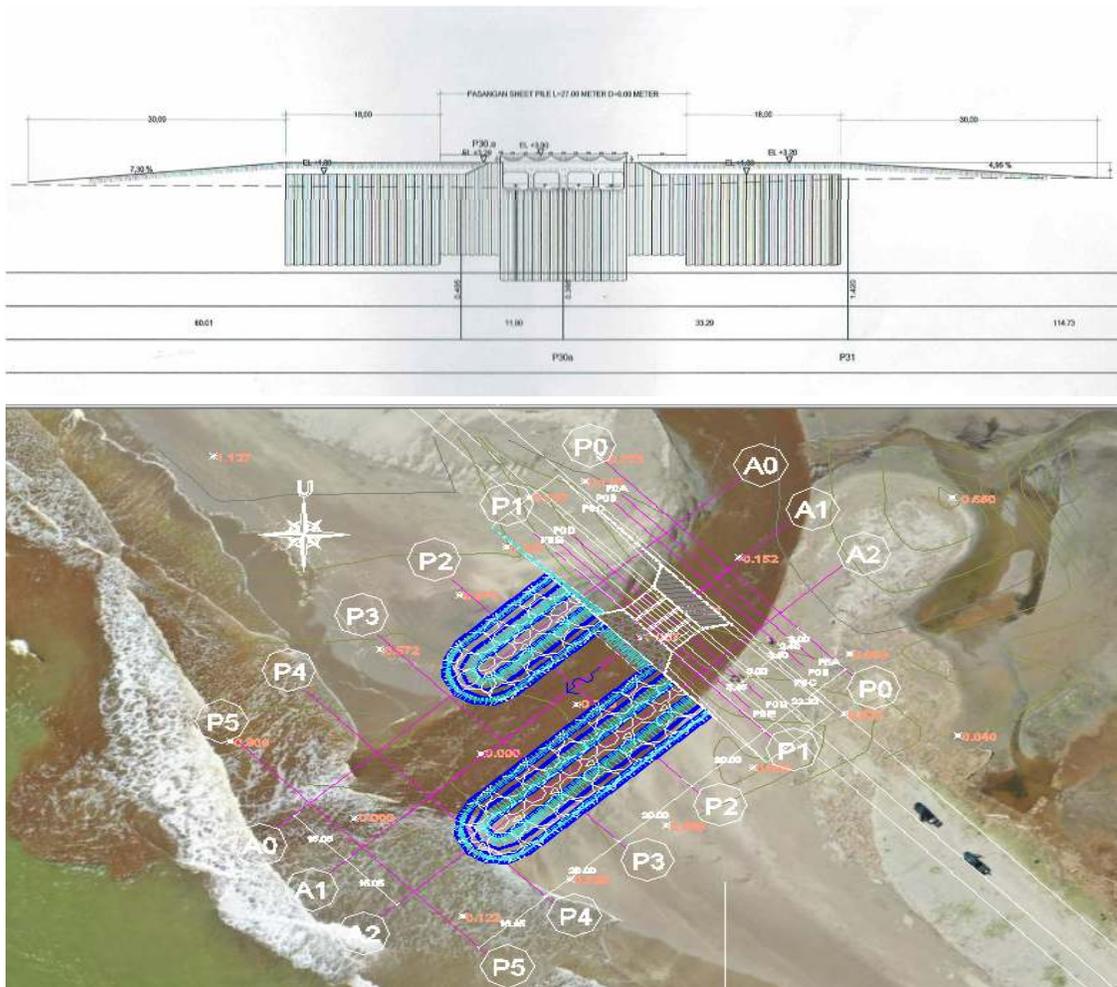
- Dalam upaya pencapaian IKU “**Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**” serta IKD “Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)” dan ”Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%)” Dinas SDABK telah menganggarkan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.

Dimana salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan Seawall Pantai Sasak, Kab. Pasaman Barat.

- Pembangunan Seawall ini ditujukan untuk mencegah atau mengurangi limpahan air laut dan banjir terhadap tanah dan struktur yang berada di belakang daerah pantai akibat badai dan gelombang. Seawall ini dibangun sejajar dengan garis pantai sebagai penguat bagian dari profil pantai. Selain itu, pembangunan seawall ini juga ditujukan untuk melindungi jalan dan permukiman warga yang beresiko terkena abrasi. Dimana saat ini akses jalan masyarakat dari Sasak menuju Nagari Maligi terputus akibat abrasi ini. Sehingga masyarakat harus melewati akses lain dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Lokasi kegiatan dapat dilihat dari peta berikut.



- Pekerjaan pembangunan seawall Pantai Sasak, Kab. Pasaman Barat telah dilelang pada awal tahun anggaran dengan pemenangnya PT. Kemuning Yona Pratama dengan kontrak nomor 04.05/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan nilai kontrak Rp. 5.643.003.957,39. Selain itu juga ditetapkan CV. Centrina Engineering sebagai konsultan pengawas pelaksana kegiatan.
- Dari hasil pantauan dilapangan diketahui bahwa progress fisik kegiatan pembangunan Seawall Pantai Sasak hingga minggu ke 37 di akhir Oktober 2023 telah mencapai 84,060% dari target rencana 78,638% (surplus 5,422%). Dimana berdasarkan kontrak, pekerjaan ini akan diserahkan pada tanggal 4 Desember 2023. Namun menurut pihak pelaksana dan pengawas, diperkirakan pekerjaan telah dapat diserahkan 1 minggu sebelum batas waktu pelaksanaan kegiatan. Adapun item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan saat ini adalah pengecoran bagian kanan bangunan sepanjang  $\pm$  100 meter. Berikut rencana gambar penanganan pembangunan seawall Pantai Sasak.



- Item pekerjaan terbesar dari proyek ini adalah pemasangan Sheet Pile Beton W-350-1000 A dengan system pemancangan dan pemasangan coble stone 200-300 Kg. Dimana untuk pemancangan sheet pile diperkirakan kedalaman pemancangan mencapai 4 meter dari total panjang sheet pile 6 meter. Nantinya Sheet Pile Beton ini berfungsi melindungi pinggir pantai dari hempasan ombak dan abrasi. Dan bangunan seawall juga membantu mengalirkan air sungai / area tampungan air menuju pantai.
- Dinas SDABK Prov. Sumatera Barat berharap kedepannya dapat menganggarkan pembangunan break water (pemecah ombak) di bagian depan bangunan seawall berbentuk leter L sebagai pelindung bangunan dari hempasan ombak dengan panjang  $\pm 70$  meter kearah laut dan 40 meter di depan bangunan. Diperkirakan biaya pembangunan break water ini sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).



- Selain melakukan peninjauan lapangan ke pembangunan seawall Pantai Sasak tahun 2023, tim juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan tebing pengaman pantai tahun 2022 yang berada tidak jauh dari lokasi pembangunan saat ini. Dari hasil pembangunan tebing pengaman pantai tahun 2022 tersebut, diketahui bahwa tebing pengaman pantai yang dibangun sepanjang 80 meter tersebut telah berfungsi namun belum optimal. Agar tebing pengaman pantai ini dapat berfungsi optimal, diperkirakan dibutuhkan penambahan bangunan tebing sepanjang  $\pm 60$  meter.



**Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Darah Irigasi Banda Gadang di Kab. Solok pada Tanggal 8 November 2023 di Kabupaten Solok**

Kunjungan lapangan yang di dampingi oleh PPTK dari dinas SDABK bahwa pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi Banda Gadang Kab. Solok hingga pada masa akhir kontrak pada tanggal 21 Agustus 2023 telah mencapai 100%, pada masa pelaksanaan kontraktor mengajukan Addendum sebanyak 2 kali hal tersebut dilakukan karena adanya perbedaan antara volumen real pekerjaan dengan volumen pekerja pada dokumen kontrak.

Berdasarkan Pengamatan di Lapangan bahwa kegiatan rehabilitasi Irigasi permukaan DI Banda Gadang terdapat 3 lokasi pekerjaan, lokasi pertama adalah pembuatan Pintu Kontrol air dan rumah pelindung pintu air dengan biaya pada tahap Persiapan Rp. 19.330.658.61,- dan pekerjaan kontruksi Rp. 277.888.271.84,- maka nilai kontrak Rp. 297.218.930,45.

Diharapkan Dinas SDABK untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kab. Solok dan Pemerintahan Nagari terkait limbah rumah tangga yang di buang pada saluran hulu Daerah Irigasi Banda Gadang dan perlu penanggulangan operasional oleh balai UPTD Selatan untuk pembersihan bekas pohon tumbang dan longsoror batu yang terdapat di dalam saluran yang ketika volumen air naik maka air akan meluap ke luar saluran yang akan mengakibatkan longsor pada dinding saluran.



**Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang (BMCKTR)**

**Monitoring dan evaluasi usulan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 ke Kabupaten Tanah Datar**

- Ruas Jalan Batusangkar-Ombilin (P.070) merupakan ruas jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 600-903.1-2015 tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Dimana ruas jalan ini memiliki panjang 17 Km yang menghubungkan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Solok.
- Berdasarkan hasil survey PKRMS tahun 2022 yang dilakukan Dinas BMCKTR, kondisi kemantapan jalan pada ruas Batusangkar-Ombilin ini berada pada angka kemantapan 81,00%. Namun memasuki tahun 2023, kondisi kemantapan jalan ruas ini terus mengalami menurun. Dimana berdasarkan hasil pantauan dilapangan terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan yang cukup berat dengan total panjang 0,75 Km yang membutuhkan penanganan berupa rekonstruksi dan 9,65 Km dalam kondisi rusak ringan yang membutuhkan pemeliharaan rutin dan berkala.
- Penurunan kemantapan jalan pada ruas Batusangkar-Ombilin (P.070) ini disebabkan karena banyaknya kendaraan besar / berat yang melewati ruas jalan ini. Dimana kendaraan-kendaraan besar / berat yang hendak menuju Bukittinggi / Payakumbuh / Medan /dll dari arah Solok dan atau sebaliknya, harus melewati ruas jalan ini. Hal ini disebabkan karena adanya jembatan perlintasan Kereta Api pada ruas jalan Nasional Batas Kab. Tanah Datar-Batas Kab. Solok (N.009) di daerah Tanjung Mutiara, Batipuh yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar /berat, karena ketinggian jembatan perlintasan kereta api ini hanya 4 meter. Atas permasalahan tersebut, Dinas BMCKTR telah beberapa kali berupaya untuk mengkomunikasikan hal ini dengan pihak Kementerian PUPR, dalam hal ini BPJN Wilayah III Sumatera Barat.
- Dari hasil pantauan lapangan yang dilakukan tim bersama perwakilan Dinas BMCKTR dan UPTD Wilayah II BMCKTR Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa terdapat beberapa titik pada ruas Batusangkar-Ombilin yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan berupa rekonstruksi. Hal ini disebabkan karena base jalan yang telah rusak dan bergelombang. Kondisi rusak berat ini berada pada STA 95+600 s/d 95+750 sepanjang 150 meter, STA 96+050 s/d 96+150 sepanjang 100 meter, STA 97+150 s/d 97+300 sepanjang

150 meter, STA 97+400 s/d 97+600 sepanjang 200 meter dan STA 104+600 s/d 104+750 sepanjang 150 meter.

- Selain itu, sepanjang ruas jalan Batusangkar-Ombilin ini juga belum dilengkapi dengan saluran drainase permanen. Sehingga sebahagian aliran air, mengarah ke jalan yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa titik. Untuk itu dibutuhkan juga penanganan berupa pembangunan drainase permanen pada beberapa titik.
- Namun mengingat keterbatasan anggaran untuk tahun 2024, Dinas BMCKTR berencana untuk menetapkan skala prioritas pada titik-titik yang membutuhkan penanganan rekonstruksi. Sementara untuk penanganan berupa pemeliharaan rutin dan berkala akan ditangani oleh UPTD Wilayah II BMCKTR Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini.



#### **Monitoring dan evaluasi usulan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 ke Kabupaten Pesisir Selatan**

- Ruas Jalan Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3) merupakan ruas jalan baru yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Sebelumnya ruas jalan ini merupakan kewenangan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan. Ruas jalan ini memiliki panjang 1,1 Km yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Peralihan status kewenangan jalan Pelabuhan TPI Carocok – Tarusan dari Pemerintah Kab. Pesisir Selatan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 ini, menyisakan sedikit permasalahan. Dimana pada saat penyusunan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, ruas jalan ini belum menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga penanganan ruas jalan ini tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Sementara pada APBD Kab. Pesisir Selatan tahun 2023, ruas jalan ini telah dianggarkan untuk pemeliharaan. Namun karena adanya peralihan status

kewenangan pada tahun 2023, Pemerintah Kab. Pesisir Selatan tidak dapat melakukan penanganan pada ruas jalan ini. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu UPTD Wilayah VI Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat hanya dapat melakukan penanganan berupa pemeliharaan rutin pada ruas jalan ini. Sementara untuk penanganan berupa Pelebaran jalan menuju standar baru dapat diusulkan pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

- Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah BMCKTR tahun 2024 telah diusulkan penanganan Jalan Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan berupa Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan anggaran Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dengan target penanganan sepanjang 0,52 Km.
- Dari hasil pantauan tim dilapangan bersama perwakilan Dinas BMCKTR dan UPTD Wilayah VI, diketahui bahwa terdapat dua segmen yang mengalami kerusakan cukup berat yaitu pada STA 0+100 s/d STA 0+500 serta STA 0+700 s/d STA 0+900. Kedua segmen ini rencananya akan dilakukan rekonstruksi dan pelebaran jalan menuju standar menjadi  $\pm 6$  meter. Untuk Readiness Criteria berupa kesediaan lahan saat ini sudah bebas. Dan direncanakan pada tahun 2023 akan dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar dan pekerjaan fisik pada tahun 2024.
- Ruas jalan ini merupakan jalan utama penghubung Tarusan menuju Pelabuhan TPI Carocok. Tingkat intensitas pengguna jalan yang cukup tinggi, mendorong Dinas BMCKTR untuk melakukan percepatan penyusunan perencanaan dan penanganan sementara untuk ruas jalan yang mengalami kerusakan yang cukup berat melalui UPTD Wilayah VI Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat.



- Selain melakukan monitoring pada ruas jalan Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan, tim juga menyempatkan melakukan monitoring pada ruas jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan (P.083). Dimana pada ruas jalan ini terdapat beberapa kerusakan yang cukup berat yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Salah satunya berupa jalan terban yang menyebabkan pondasi dan badan jalan tergerus. Hal ini tidak terlepas dari tingginya intensitas kendaraan berat pembawa batu bara dari Padang menuju PLTU Teluk Sirih. Dinas BMCKTR melalui UPTD Wilayah VI telah melakukan komunikasi terkait rencana kerja sama penanganan ruas jalan ini dengan pihak PLTU Teluk Sirih dan Pihak Ketiga Penyedia Batu Bara. PLTU Teluk Sirih dan Pihak Ketiga berjanji akan melakukan perbaikan terhadap ruas jalan yang rusak / terban tersebut. Agar penanganan ruas jalan tersebut tidak salah sasaran, maka Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat akan menyusun Dokumen Perencanaan untuk penanganan jalan rusak / terban ini.

**Monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan program dan kegiatan rekonstruksi jalan Ruas Sitangkai-Tanjung Ampalu (P.040) di Kab. Sijunjung**

- Ruas Jalan Sitangkai-Tanjung Ampalu (P.040) merupakan ruas jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Ruas jalan ini memiliki panjang 17,5 Km yang menjadi penghubung antara Kab. Tanah Datar dengan Kab. Sijunjung. Dimana 4,7 Km diantaranya berada di Kabupaten Tanah Datar (STA 131+300 s.d 136+000) dan 12,8 Km di Kabupaten Sijunjung (STA 136+000 s.d 148+800).
- Berdasarkan data kondisi Kemantapan Jalan per Februari 2023, ruas jalan Sitangkai-Tanjung Ampalu (P.040) memiliki kemantapan jalan 88,57% atau sepanjang 15,50 Km. Sementara kondisi tidak matap terdapat pada 2 (dua) segmen dengan Panjang total 2 Km. Untuk itu, pada tahun anggaran 2023 Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp. 4.752.300.000,- untuk penanganan jalan ruas Sitangkai-Tanjung Ampalu (P.040) berupa rekonstruksi jalan.
- Dari hasil lelang pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sitangkai-Tanjung Ampalu (P.040) yang dilakukan UKPBJ Provinsi Sumatera Barat, didapatkan pemenang lelang an. PT. Dapindo Pratama dengan nilai kontrak Rp. 4.513.209.122,15 dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 150 hari kalender (29 Maret 2023 s.d 25 Agustus 2023). Sementara untuk Konsultan Pengawas dilakukan oleh CV. Misuda Engineering Consultant dengan kontrak Rp. 141.438.975,-.
- Pekerjaan yang dilakukan berupa rekonstruksi jalan berupa perbaikan struktur jalan, pengaspalan dan pembetonan bahu jalan. Dimana kegiatan rekonstruksi dilakukan pada 2

(dua) segmen yaitu Segmen 1 pada STA 131+300 s.d STA 132+200 sepanjang 900 meter yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan Segmen 2 pada STA 140+000 s.d 141+100 sepanjang 1.100 meter yang berada pada Kabupaten Sijunjung.

- Pada Segmen 1, saat ini telah selesai dilakukan pengaspalan dan tengah dalam proses rigid beton bahu jalan. Dimana rigid beton bahu jalan sebelah kiri telah selesai dilakukan. Sementara rigid beton untuk bahu jalan sebelah kanan rencananya akan dilakukan setelah habis masa perkerasan rigid beton bahu jalan sebelah kiri. Sehingga pengerjaan rigid beton bahu jalan sebelah kanan nantinya tidak mengganggu pengguna jalan dan dapat memanfaatkan bahu jalan sebelah kiri.
- Sementara pada segemen 2, saat ini telah selesai dilakukan pengaspalan. Dan rencananya untuk bahu jalan pada segmen ini hanya akan dilakukan pembersihan bahu jalan saja. Namun Dinas BMCKTR berharap sisa tender pekerjaan rekonstruksi jalan ini dapat dimanfaatkan, yang rencananya akan digunakan untuk rigid beton bahu jalan pada segmen 2 sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selain rekonstruksi dan pengaspalan jalan, pada segmen ini juga terdapat rekonstruksi jembatan / penggantian gorong-gorong yang menyeberangi jalan. Dimana Dinas BMCKTR menggunakan Box Culvert sebagai pengganti gorong-gorong sebelumnya yang telah mengalami kerusakan. Dan saat ini pekerjaan penggantian gorong-gorong telah dalam tahap finalisasi dan perbaikan aspal jalan.
- Secara keseluruhan, progress pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Sitangkai-Tanjung Ampalu (P.040) telah mencapai bobot 78%. Capaian progress pekerjaan ini jauh diatas target yang direncanakan. Sehingga diperkirakan pekerjaan rekonstruksi jalan ini dapat selesai sebelum berakhirnya kontrak kerja pada 25 Agustus 2023. Saat ini hanya tersisa beberapa pekerjaan minor, pembersihan bahu jalan pada segmen 2, finishing jembatan serta rigid beton bahu jalan pada segmen 1. Selama pelaksanaan kegiatan, ditemui beberapa kendala diantaranya keterlambatan pasokan ready mix untuk pengecoran bahu jalan serta tingginya intensitas pengguna jalan. Namun kendala-kendala ini dapat diatasi sehingga tidak terlalu mengganggu terhadap pelaksanaan pekerjaan.



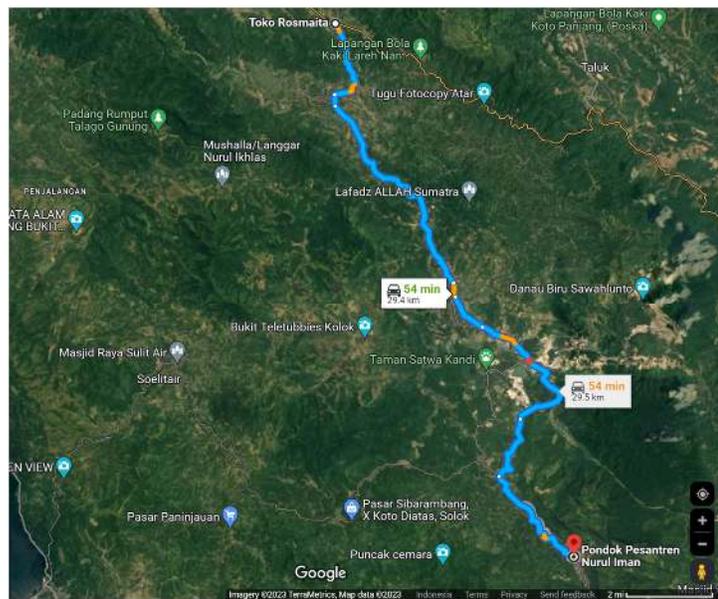
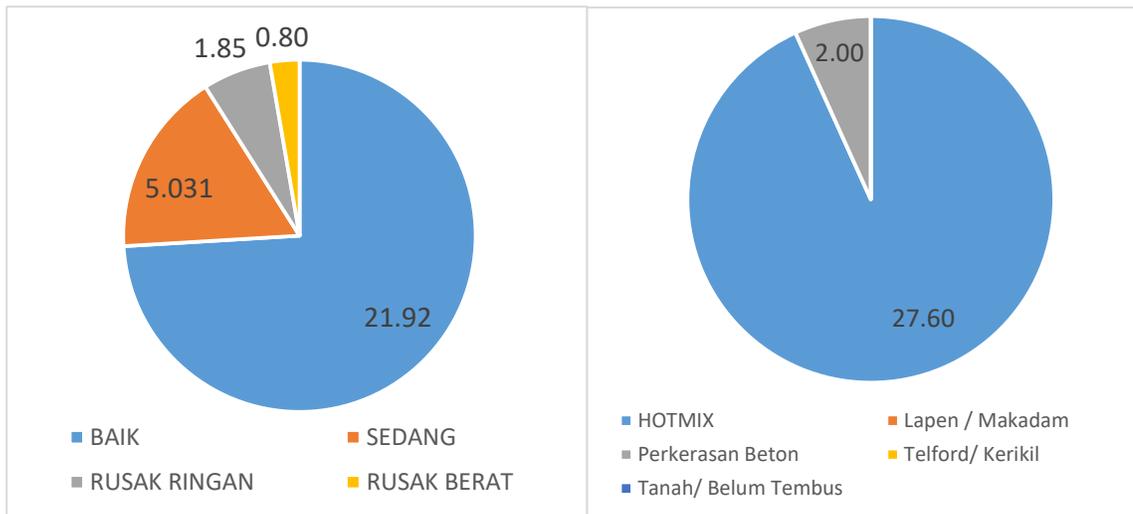
Tanggal 14 Agustus 2023

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah “**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**”, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan. Untuk mencapai target IKU tersebut, program utama yang harus dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur jalan maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala di lapangan.

Salah satu lokus pekerjaan pada Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2023 adalah ruas Jalan Guguk Cino – Sawahlunto. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 29,6 km dengan lebar rata-rata 5,7 m yang membentang dari Simpang Guguk Cino di Kabupaten Tanah Datar menuju Lapangan Segitiga di Kota Sawahlunto. Kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 21,92 km, kondisi sedang sepanjang 5,03 km, rusak ringan sepanjang 1,85 km, dan rusak ringan sepanjang 0,8 km. Ruas jalan ini memiliki jenis perkerasan aspal hotmix sepanjang 27,6 km dan perkerasa beton sepanjang 2 km.



**Peta dan Kondisi Ruas Jalan Guguk Cino – Sawahlunto**

Ruas jalan Guguk Cino – Sawahlunto merupakan akses utama pergerakan orang dan barang antara Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto. Diestimasikan pada tahun 2011 jumlah pergerakan orang sebanyak 85.340 smp. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 205.313 smp pada tahun 2030 mendatang, meningkat lebih dari 2,4 kali lipat dari tahun 2011. Hal ini tentu perlu disikapi dengan penanganan jalan yang tepat. Sebab dalam kacamata regional ruas jalan ini menjadi alternatif utama pergerakan dari Kawasan Tenggara Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kawasan perbatasannya dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi yaitu Kota Bukittinggi.

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Penanganan *Longsegment* Jalan Guguk Cino – Sawahlunto dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dengan nilai Kontrak setelah addendum-I yaitu Rp. 7.133.572.000,00. Kontraktor Pelaksana kegiatan ini adalah PT. Dapindo Pratama dengan konsultan supervisi CV. Misuda Engineering Consultant. Terdapat 2 (dua) jenis penanganan yaitu pekerjaan berkala dan pekerjaan rutin dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berkala selama 180 kalender dan pekerjaan rutin selama 300 kalender.

#### 1. Pekerjaan Berkala

Detail pekerjaan berkala yaitu *overlay* berupa pengaspalan badan jalan sepanjang 2.833 m yang terdiri dari 4 segment pekerjaan serta perkerasan beton sepanjang 67 m yang terdiri dari 2 titik pekerjaan.

Direncanakan pekerjaan berkala ini akan diselesaikan (PHO) pada tanggal 29 Agustus 2023. Status progres pekerjaan hingga Minggu ke-24 sudah mencapai 90,46% dari target 92,39%. Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan pekerjaan, baik kendala teknis maupun kendala non-teknis sehingga dapat disimpulkan pekerjaan ini *on the track*.

#### 2. Pekerjaan Rutin

Panjang pekerjaan rutin yaitu sepanjang 30 Km (KM 116+566 – 146+450), termasuk pemeliharaan kinerja jembatan, pengendalian tanaman, pembersihan rambu, pembersihan patok, pembersihan drainase, dan galian pada saluran air atau lereng untuk pemeliharaan. Direncanakan pekerjaan rutin ini akan diselesaikan (PHO) pada tanggal 27 Desember 2023.



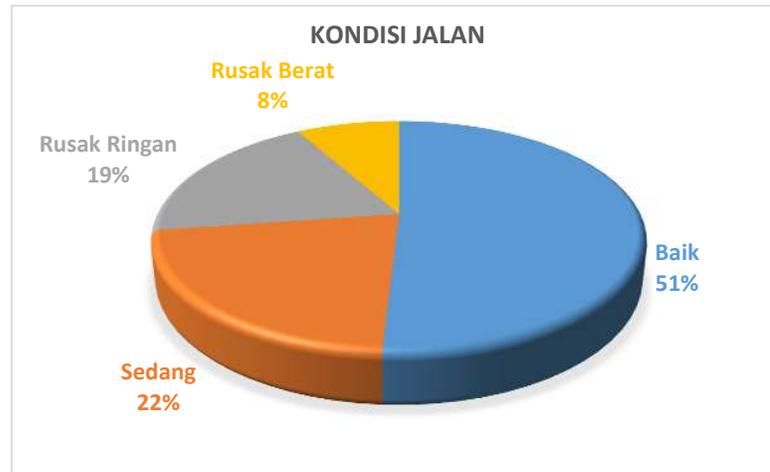
**Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan long segment jalan ruas Rao Rokan-Batas Riau Tanggal 23 s.d 24 Agustus 2023**

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi serta untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

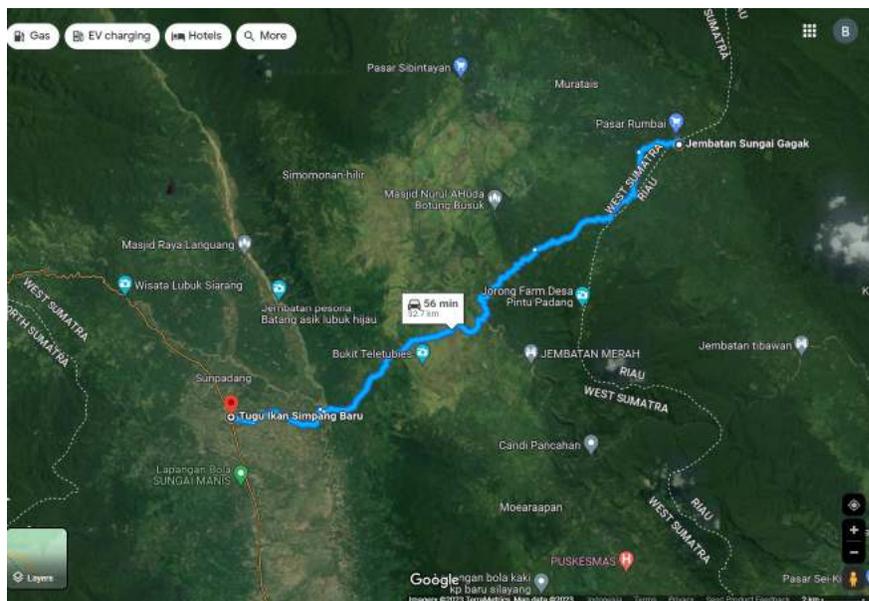
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah “**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**”, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan. Untuk mencapai target IKU tersebut, program utama yang harus dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur jalan maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala di lapangan.

Salah satu lokus pekerjaan pada Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2023 adalah ruas jalan Rao Rokan-Batas Riau (P.095). Ruas jalan ini merupakan ruas jalan kewenangan Provinsi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Dimana ruas jalan Rao Rokan-Batas Riau ini memiliki panjang 33,00 km dengan lebar rata-rata 4 m yang membentang dari Tugu Ikan Simpang Baru, Kecamatan Rao hingga perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan pendataan kondisi kemantapan jalan pada bulan Februari 2023, kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 16,8 km, kondisi sedang sepanjang 7,20 km, rusak ringan sepanjang 6,30 km, dan rusak berat sepanjang 2,70 km. Dimana sepanjang ruas jalan ini telah teraspal dengan kemantapan jalan 72,73%.



**Kondisi Ruas Jalan Rao Rokan-Batas Riau (P.095)**



**Peta Ruas Jalan Rao Rokan-Batas Riau (P.095)**

Ruas jalan Rao Rokan-Batas Riau merupakan akses utama pergerakan orang dan barang antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau, khususnya Kab. Pasaman dan Pasaman Barat dengan Provinsi Riau. Dimana bagi masyarakat Kab. Pasaman yang hendak menuju Kota Pekanbaru / sebaliknya, ruas jalan Rao Rokan-Batas Riau ini dapat menghemat waktu tempuh secara signifikan jika dibandingkan rute via Bukittinggi. Untuk itu, besar harapan masyarakat agar ruas jalan ini dapat ditangani dan ditingkatkan kemantapannya.

Untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR Provinsi

Sumatera Barat telah menganggarkan kegiatan penanganan long segment ruas jalan Rao Rokan-Batas Riau yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan. Dimana kegiatan ini telah terkontrak an. PT. Pasindo Prima Kreasi pada tanggal 7 Maret 2023 dengan nilai kontrak setelah Addendum I sebesar Rp. 9.150.547.000,- dengan konsultan pengawas PT. Raissa Gemilang. Kegiatan penanganan long segment ini terdiri dari dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan rutin dan pekerjaan berkala.

#### 1. Penanganan Ruitn

Untuk penanganan rutin, penanganan dilakukan disepanjang ruas jalan Rao Rokan-Batas Riau (33 km) berupa patching aspal, pembersihan bahu jalan, drainase / saluran, dan tebing serta perawatan rutin lainnya. Selain itu juga dilakukan pemasangan mortar pada bahu jalan pada STA 21+650 s.d STA 21+750 sepanjang 100 meter. Untuk pekerjaan rutin ini dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### 2. Penanganan Berkala

Penanganan berkala merupakan komponen terbesar dari kontrak penanganan long segment Ruas Rao Rokan-Batas Riau ini. Adapun penanganan berkala yang akan dilakukan berupa Perbaikan Campuran Aspal Panas (CAP) Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC) (Levelling) dan Overlay Lapis Aus AC-WC dengan total panjang penanganan 2.610 meter dengan lebar aspal 4 s.d 6 meter. Dimana terdapat 7 (tujuh) segmen jalan yang akan ditangani melalui penanganan berkala ini.

Segmen pertama berada pada STA 2+175 s.d STA 2+550 yang ditangani berupa pengaspalan sepanjang 375 meter. Segmen kedua berada pada STA 5+725 s.d STA 5+825 sepanjang 100 meter berupa overlay asphalt. Segmen ketiga berada pada STA 15+750 s.d STA 16+025 dengan penanganan berupa pengaspalan. Segmen ini berada tepat di dekat Kantor Camat Mapat Tunggul dan menjadi akses utama masyarakat menuju pusat pemerintahan kecamatan. Segmen ke empat berada pada STA 16+590 s.d STA 18+025 dengan penanganan berupa overlay aspal. Segmen ke lima berada pada STA 19+400 s.d STA 19+600 dengan penanganan berupa overlay asphalt. Segmen ke enam berada pada STA 25+150 s.d STA 25+300 dengan penanganan berupa overlay asphalt. Dan segmen terakhir berada pada STA 31+250 s.d STA 31+350 dengan penanganan berupa rekonstruksi dan pemasangan bronjong.

Dari tujuh segmen penanganan berkala tersebut, enam segmen diantaranya telah selesai dilaksanakan. Dan saat ini hanya menyisakan satu segmen yang berada pada STA 31+250 s.d STA 31+350. Dimana pada segmen ini dilakukan rekonstruksi jalan dan pemasangan bronjong penahan tebing yang berada pada pinggir sungai dan bahu jalan. Pada segmen ini sering terjadi longsor yang mengakibatkan badan jalan terban dan tertimbun reruntuhan sedimen. Untuk itu direncanakan akan

dilakukan pemasangan bronjong sebanyak 20 tingkat pada sempadan sungai dan 5 tingkat pada bahu jalan. Untuk saat ini, pemasangan bronjong pada bahu jalan telah selesai dilaksanakan. Sementara untuk pemasangan pada sempadan sungai masih dalam proses pengerjaan.

Secara keseluruhan, progress fisik pekerjaan penanganan long segmen ruas jalan Rao Rokan-Batas Riau telah mencapai 76,77% dari rencana target 81,52%. Dimana terdapat deviasi sebesar 4,75%. Deviasi ini terjadi karena sempat terkendalanya pemasangan pondasi bronjong pada sempadan sungai yang disebabkan oleh tingginya curah hujan, longsor dan naiknya permukaan air sungai pada beberapa minggu yang lalu yang menyebabkan beberapa daerah mengalami banjir di Kab. Pasaman. Namun diperkirakan deviasi ini dapat segera diatasi mengingat pekerjaan pemasangan pondasi bronjong pada sempadan sungai telah terlaksana.



### **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Payakumbuh – Sitangkai Tanggal 11 Oktober 2023**

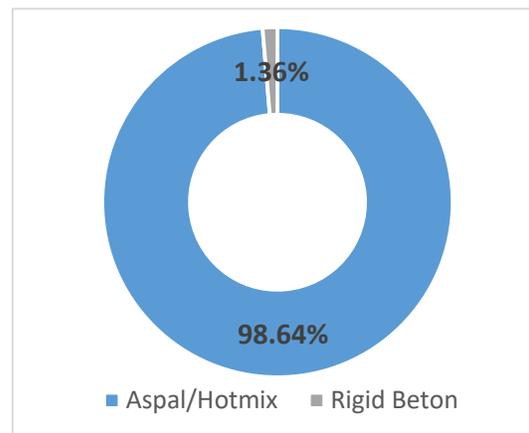
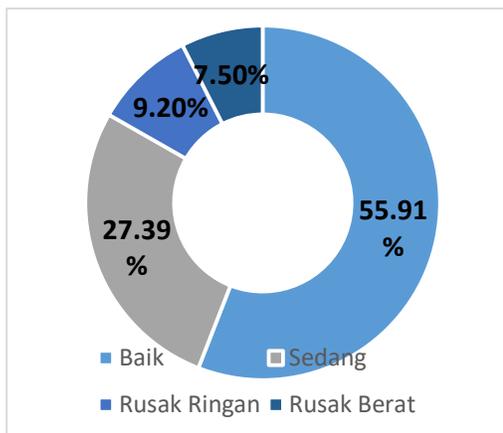
Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

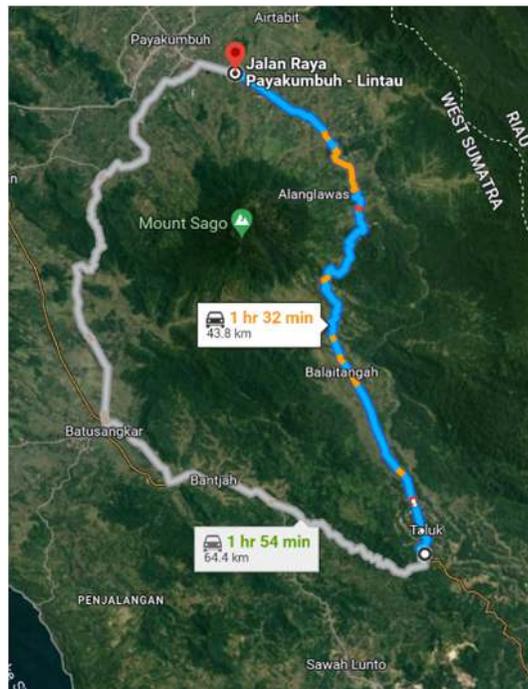
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah

menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah “**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**”, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan. Untuk mencapai target IKU tersebut, program utama yang harus dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur jalan maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala di lapangan.

Salah satu ruas jalan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah ruas Jalan Payakumbuh – Sitangkai. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 44,0 km dengan lebar rata-rata 5,0 m yang membentang dari Batas Kota Payakumbuh di Kabupaten Lima Puluh Kota menuju Sitangkai di Kabupaten Tanah Datar. Kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 24,60 km, kondisi sedang sepanjang 12,50 km, rusak ringan sepanjang 4,05 km, dan rusak ringan sepanjang 3,3 km. Ruas jalan ini memiliki jenis perkerasan aspal hotmix sepanjang 43,4 km dan perkerasan beton sepanjang 0,6 km.





**Peta dan Kondisi Ruas Jalan Payakumbuh – Sitangkai**

Ruas jalan Payakumbuh – Sitangkai merupakan akses utama pergerakan orang dan barang antara kawasan timur Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Sijunjung. Diestimasikan pada tahun 2011 jumlah pergerakan orang sebanyak 85.340 smp. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 205.313 smp pada tahun 2030 mendatang, meningkat lebih dari 2,4 kali lipat dari tahun 2011. Hal ini tentu perlu disikapi dengan penanganan jalan yang tepat. Sebab dalam kacamata regional ruas jalan ini menjadi alternatif utama pergerakan dari Kawasan Tenggara Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kawasan perbatasannya dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi yaitu Kota Payakumbuh menuju PKN Kota Pekanbaru.

Hanya saja dalam perkembangannya ruas jalan provinsi ini cukup banyak melayani pergerakan antar provinsi dari dan menuju PKN Pekanbaru ke arah Tenggara Sumatera Barat menuju Muaro Bungo dan ke arah Jakarta. Terdapat beberapa trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang melewati jalan ini. Keberadaan jalan ini menjadi perhatian publik ketika sebagian ruas jalan sekitar sepanjang 7-8 km mengalami kerusakan cukup parah dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Provinsi sehingga masyarakat menempuh jalur pengaduan melalui media sosial. Berbekal kondisi tersebut Bappeda Provinsi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan Provinsi pada ruas Payakumbuh – Sitangkai.

Setelah berkordinasi dengan Pemerintah Nagari setempat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penyebab utama kerusakan kondisi jalan adalah keberadaan beberapa Perusahaan tambang galian C dengan material utama yaitu batuan kapur. Beberapa Perusahaan tersebut yaitu PT. Sumatera Sumber Mineral, CV. Aikes Tanjung Mandiri, PT. Sumbar Calcium Pratama, dan PT. Anugerah Halaban Sepakat. Material tambang diangkut menggunakan truk dengan MST 30 ton yang tidak cocok dengan kriteria jalan provinsi yang hanya mampu melayani truk dengan MST sekitar 15 ton.
2. Ruas jalan yang mengalami kerusakan parah sebagian besar berada di Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Ruas jalan yang rusak arah ini hanya ditangani dengan timbunan sirtu sehingga menimbulkan polusi udara di sepanjang ruas jalan yang rusak. Informasi dari Masyarakat setempat, penanganan jalan ini dalam skala besar terakhir dilakukan tahun 2018 ketika Program *Tour de Singkarak*. Ketika program TdS tidak lagi melewati jalur ini, penanganan jalan pun hanya sebatas pemeliharaan rutin saja.

Berdasarkan kondisi kemantapan jalan, dari sejumlah ruas jalan provinsi, ruas jalan ini termasuk ke dalam 10 ruas jalan yang sudah tembus namun memiliki panjang jalan rusak yang tinggi yaitu sekitar 7,35 km. Dari sisi kesiapan teknis, studi kelayakan (FS), *Detail Engineering Design* (DED), dan ketersediaan lahan. Untuk usulan penanganan jalan ini yaitu, rehabilitasi major dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 37,75 Milyar. Sangat penting bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meminimalkan kerusakan jalan di daerah ini.



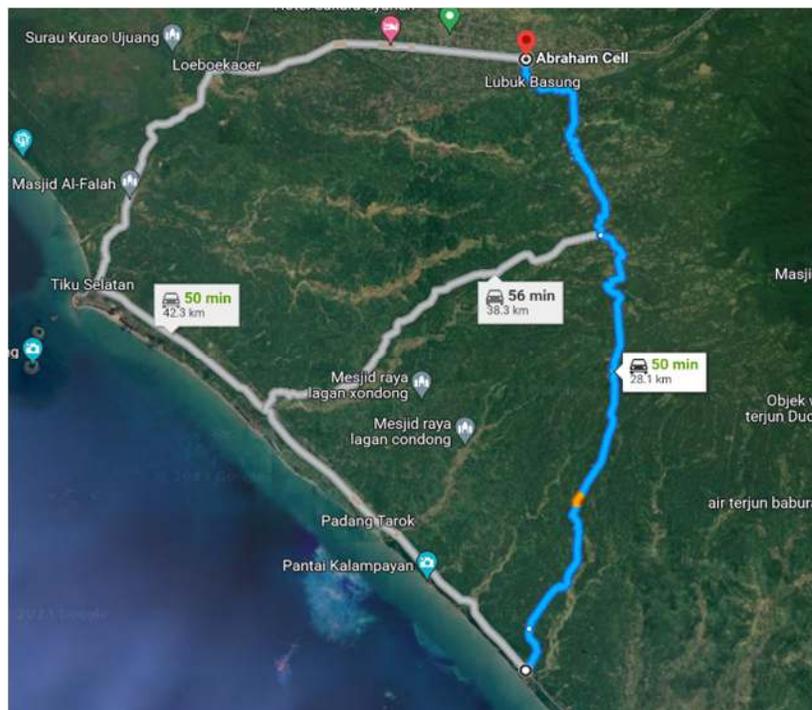
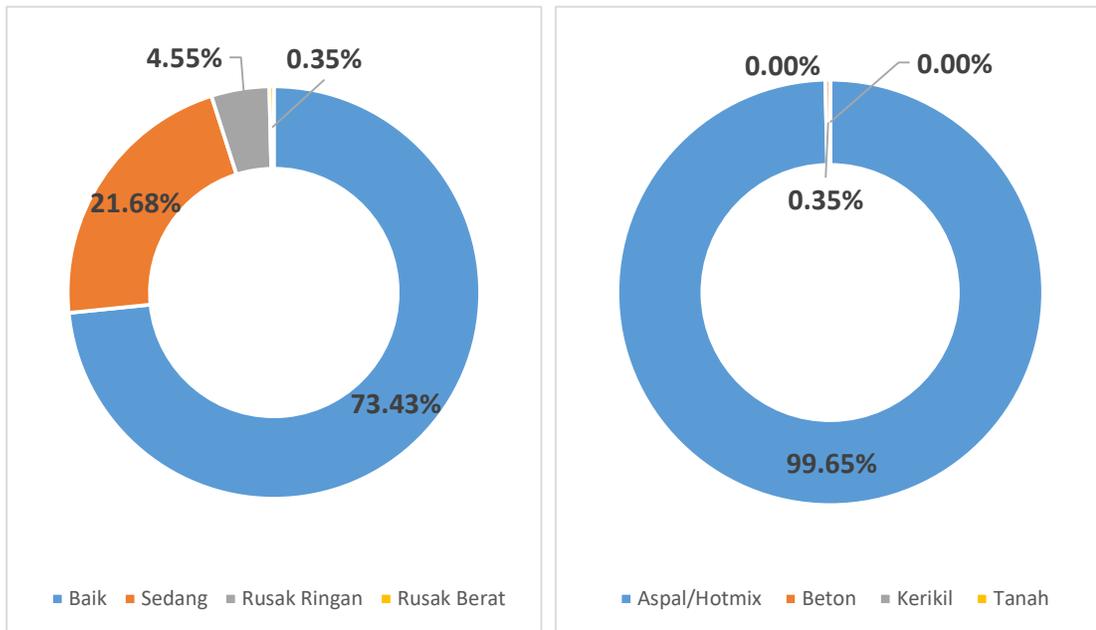
### Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Lubuk Basung - Sungai Limau Tanggal 26 Oktober 2023

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah “**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**”, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan. Untuk mencapai target IKU tersebut, program utama yang harus dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur jalan maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala di lapangan.

Salah satu lokus pekerjaan pada Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2023 adalah ruas Jalan Lubuk Basung – Sungai Limau. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 28,6 km dengan lebar rata-rata 4,5 m yang membentang dari Simpang 3 Lubuk Basung di Kabupaten Agam menuju Simpang 3 Pasar Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 21,00 km, kondisi sedang sepanjang 6,20 km, rusak ringan sepanjang 1,30 km, dan rusak berat sepanjang 0,10 km. Ruas jalan ini memiliki jenis perkerasan aspal hotmix sepanjang 28,5 km dan perkerasan beton sepanjang 0,1 km.



**Peta dan Kondisi Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, ruas jalan Lubuk Basung - Sungai Limau merupakan akses utama pergerakan orang dan barang bagi masyarakat Sungai Geringging menuju pusat kegiatan skala lokal di Sungai Limau maupun menuju Pusat kegiatan di

Lubuk Basung serta akses menuju jalan Nasional Pariaman – Simpang Empat. Dihat dari pengamatan sederhana di lapangan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di ruas ini tidak begitu besar.

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Basung - Sei. Limau (P.072) dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan nilai Kontrak setelah addendum-III yaitu Rp.9.830.111.000. Kontraktor Pelaksana kegiatan ini adalah PT. Alco Sejahtera Abadi dengan konsultan supervisi PT. Konsulindo Citra Ernala. Terdapat 3 (tiga) jenis penanganan yaitu pengaspalan, Pembangunan *Retaining Wall Concrete* (RWC), dan pembangunan saluran dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 276 hari kalender.

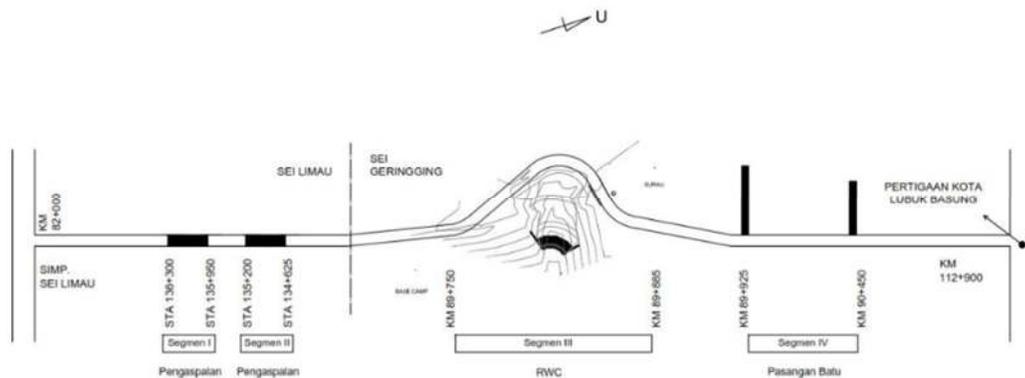
### 3. Pekerjaan Pengaspalan

Detail pekerjaan pengaspalan yaitu *overlay* berupa pengaspalan badan jalan sepanjang 935 m yang terdiri dari 2 segment pekerjaan di STA 135+950 s.d. STA 136+300 dan STA 134+625 s.d. STA 135+200.

Pekerjaan pengaspalan ini akan dilanjutkan dengan pembangunan bahu jalan pada titik krusial seperti fasilitas pendidikan sekolah dasar dan tikungan dengan radius relatif kecil.

### 4. Pekerjaan Pembangunan RWC

Pembangunan RWC ini didasarkan pada kondisi ruas jalan yang terban pada tahun 2021 yang lalu. Di titik ini untuk sementara di tahun lalu dibangun jalan darurat di sebelah kiri jalan. Perkuatan tebing untuk ruas jalan yang terban cukup sulit karena kondisi topografi yang curam dan struktur tanah yang labil. Pembangunan RWC direncanakan setinggi 11 m, dengan panjang 20 m, untuk kemudian dilakukan pembentukan sub grade jalan dengan timbunan biasa yang diperkuat dengan geotekstil setinggi 21 m, dengan panjang 50 m.





#### **Dokumentasi Pembangunan RWC**

Progres pelaksanaan pekerjaan sampai pada tanggal 22 Oktober 2023 mencapai 60,75%. Tantangan terbesar dalam pekerjaan ini adalah proses pembentukan sub grade jalan dengan timbunan yang membutuhkan biaya yang cukup besar karena volume timbunan yang sangat besar. Namun kontraktor pelaksana tetap optimis pekerjaan akan selesai tepat waktu. Direncanakan pelaksanaan pekerjaan akan selesai pada tanggal 27 Desember 2023.

#### **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Jembatan Batang Tomak pada Ruas Jalan Bunga Tanjung - Teluk Tapang Tanggal 9-10 November 2023**

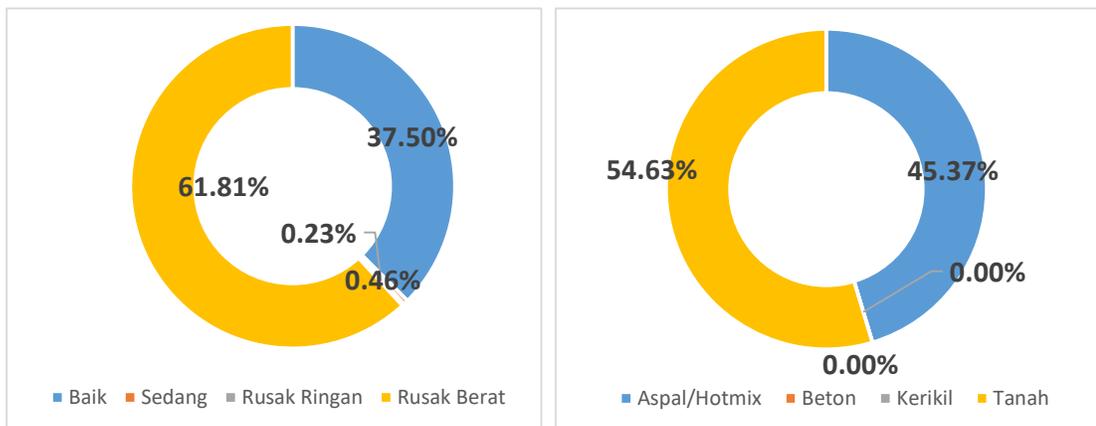
Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

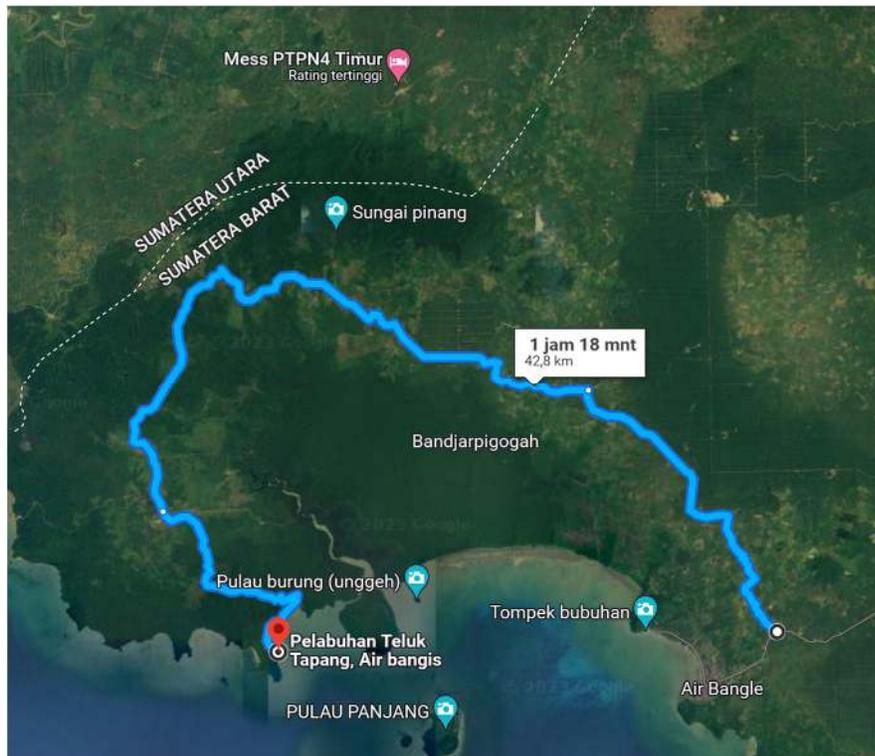
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Salah satu

prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah “**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**”, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan. Untuk mencapai target IKU tersebut, program utama yang harus dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur jalan maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala di lapangan.

Salah satu lokus pekerjaan pada Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2023 adalah ruas Jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 43,2 km dengan lebar rata-rata 5,5 m yang membentang dari Simpang 3 Bunga Tanjung menuju Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 16,20 km, kondisi sedang sepanjang 0,20 km, rusak ringan sepanjang 0,1 km, dan rusak berat sepanjang 26,70 km. Ruas jalan ini memiliki jenis perkerasan aspal hotmix sepanjang 19,6 km dan sisanya sepanjang 23,6 km masih berupa tanah.





**Peta dan Kondisi Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau**

Pelabuhan Teluk Tapang merupakan Pelabuhan yang dirancang sebagai Pelabuhan Pengumpul bagi Kawasan utara Provinsi Sumatera Barat yaitu Pasaman Barat, Agam, dan Pasaman serta satu Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara. Kawasan ini mempunyai potensi besar dibidang Agribisnis seperti kelapa sawit, coklat, karet dan jagung. Komoditas ini umumnya dibawa dengan jalan darat ke Pelabuhan Teluk Bayur untuk diekspor. Untuk mengurangi biaya logistik dan kerusakan jalan akibat tingginya frekuensi lalu lintas angkutan terutama untuk sawit maka telah dibangun Pelabuhan Teluk Tapang di sisi laut melalui Dana APBN. Pembangunan pelabuhan ini tidak diiringi dengan pembangunan sisi darat dan jalan akses menuju Pelabuhan. Fasilitas di sisi darat Pelabuhan belum tersedia secara keseluruhan dan ketiadaan akses jalan membuat Pelabuhan ini belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Pembangunan jalan akses sudah berlangsung dalam 4 tahun terakhir melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Pasaman Barat, dan menyisakan sebagian kecil jalan yang belum tersambung. Jalan akses yang telah terbangun sepanjang 19 km, sedang proses pembangunan jalan akses sepanjang 23,47 km yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan skema MYC T.A 2022- 2024 dengan sumber dana SBSN. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah membangun 2 (dua) unit jembatan, dan 4 unit lagi akan dibangun menggunakan anggaran pada tahun anggaran 2023-2024. Salah satu jembatan yang sedang dalam konstruksi tahun 2023.

Kegiatan Pembangunan Jembatan Batang Tomak pada Ruas Jalan Bunga Tanjung - Teluk Tapang (P.097) dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan nilai Kontrak setelah addendum-II yaitu Rp.7.229.542.358. Kontraktor Pelaksana kegiatan ini adalah PT. Trisco Jaya Utama dengan konsultan supervisi PT. Konsulindo Citra Ernala. Lingkup pekerjaan berupa Jembatan Gelagar Baja Komposit bentang 30 m serta lebar jembatan 9 m (Badan Jalan 7 m & trotoar 1 m kiri kanan) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 240 hari kalender.



#### **Dokumentasi Pekerjaan**

Progres pelaksanaan pekerjaan sampai pada tanggal 9 November 2023 mencapai 84,84%, defisit 4,73% dari rencana 89,57%. Namun kontraktor pelaksana tetap optimis pekerjaan akan selesai tepat waktu. Direncanakan pelaksanaan pekerjaan akan selesai pada tanggal 28 November 2023. Keberadaan jembatan ini sangat krusial dalam rencana pengoperasian Pelabuhan Teluk Tapang mengingat pada saat ini Pelabuhan Teluk Tapang sudah mulai beroperasi dengan adanya pengiriman bijih besi ke smelter di Morowali, Sulawesi Tenggara untuk kemudian diekspor ke luar negeri. Progres pembangunan jalan sendiri sudah mencapai sekitar 55% dari total pekerjaan 23,6 km dan menyisakan sekitar 10 km lagi dalam sisa kontrak hingga akhir tahun 2024.

### BAB III PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan realita yang menunjukkan bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi dan merupakan vatalisator proses pembangunan daerah.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan, dengan demikian belanja publik yang dialokasikan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi Lumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor.

Secara umum permasalahan dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan terkait infrastruktur di kabupaten/kota dengan provinsi.
2. Dinamika perkembangan wilayah yang cepat dan variatif terhadap waktu membuat perencanaan pembangunan yang telah disepakati pada awal perencanaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Program-program mercusuar Kepala Daerah yang baru terpilih seringkali tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ada seperti RTRW Kabupaten/Kota dan bahkan RPJMD sendiri.
4. Kurangnya rapat-rapat koordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi terkait membuat perencanaan pembangunan daerah sedikit terkendala dalam pelaksanaannya. Selain itu mutasi pegawai yang ada juga berdampak secara tidak langsung terhadap hal tersebut.
5. Belum terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup secara optimal

Permasalahan pembangunan pada pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut:

#### **3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Belum meratanya konektivitas jalan antar daerah kabupaten/kota, /provinsi tetangga, jalan mitigasi bencana, jalan menuju kawasan strategis, dan akses jalan pesisir pantai barat Pulau Sumatera.
- b. Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak akibat muatan lebih, kejadian bencana alam, dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan jalan

- c. Belum optimalnya pelayanan air minum disebabkan keterbatasan sumber air baku untuk SPAM Regional dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA regional dan IPLT di beberapa Kab/Kota.
- e. Masih belum tuntasnya pembangunan beberapa bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi dan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah Kab/Kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera.
- f. Kurang Fokusnya pembangunan terhadap penataan bangunan dan lingkungannya pada Kawasan Strategis
- g. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran (RTRW yang belum dibuat dan dilegalisasi).
- h. Belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh tidak terintegrasinya RTRW dengan rencana pembangunan.

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan penanggulangan banjir dan bencana alam akibat daya rusak air sungai yang berdampak kepada permukiman dan lahan pertanian.
- b. Belum optimalnya penanganan dan perbaikan jaringan irigasi yang berakibat kepada kurangnya produksi pertanian dan juga banyak lahan irigasi yang beralih fungsi.
- c. Belum optimalnya pengendalian abrasi pantai pada daerah yang berada pada kawasan pantai
- d. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung air (embung) untuk kebutuhan penduduk.

### 3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a. Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- b. Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
- c. Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan sebidang

- kereta api mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan.
- d. Masih Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan

### 3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup mencakup persampahan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi/pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian polusi yang ditimbulkannya. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah (46%), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 4R (*Reduce, Recycle, Reuse, Replace*) dalam pengelolaan sampah Akibatnya tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah tidak mampu menampung volume sampah yang ada.
- b. Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup belum terlaksana sebagaimana mestinya akibat pengawasan dan penataan hukum yang belum optimal.
- c. Penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati danau prioritas nasional (Danau Singkarak dan Danau Maninjau).
- d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal seperti konservasi daerah aliran sungai dan danau.
- e. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan Rendah Karbon untuk pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas Emisi.

### 3.4. Program Unggulan 2021 - 2026

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka terdapat beberapa Program Unggulan yang menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan Tahun 2021-2026

Bahwa Program Unggulan tersebut perlu ditetapkan kinerjanya secara lebih rinci yang terdiri dari rumusan definisi operasional, indikator kinerja, satuan, target tahun 2021-2026, sub kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja serta Perangkat Daerah yang melaksanakan serta bertanggungjawab dan mengkoordinir pencapaian target dari masing-masing Program Unggulan tersebut;

Bahwa indikator kinerja, satuan dan target dari masing-masing Program Unggulan menjadi dasar penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi capaian terhadap Program Unggulan setiap tahunnya.

### **Indikator Kinerja Utama 2021 - 2026**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

- 1) Infrastruktur memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah sehingga dengan demikian percepatan pembangunan infrastruktur merupakan hal prioritas yang harus dilakukan oleh daerah;
- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur membutuhkan komitmen dari semua pihak dan pemangku kepentingan terkait, tidak hanya dari unsur pemerintah daerah, namun juga pihak *private sector* dan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan;
- 3) Kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional dan harus diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah untuk menunjukkan keselarasan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara kegiatan pusat dan daerah, baik dari sisi fungsi, besaran, waktu, maupun lokasi;
- 4) Pembangunan infrastruktur membutuhkan ketepaduan dalam pengelolaannya mulai dari perencanaan, penganggaran, proses konstruksi, hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini juga perlu ditunjang oleh sistem informasi baik dari sisi proses pengusulan data secara numerik maupun dari segi sistem informasi geografis untuk mengakomodir kebijakan satu peta.

### 4.2 Saran

- 1) Dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah harus mengakomodir kebijakan dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur pusat dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur;
- 2) Perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas antara rencana percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat, provinsi tetangga, dan rencana pembangunan sektoral lainnya;
- 3) Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, Provinsi Sumatera Barat harus mampu memanfaatkan peluang yang ada, misalnya tingginya volume perjalanan orang dan barang yang akan menjadi demand yang potensial untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Peluang lainnya terkait infrastruktur bertaraf internasional yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat seperti pelabuhan dan bandara yang berpotensi untuk mendatangkan investor. Disamping itu Sumatera Barat juga termasuk dalam salah satu dari 10 + 1 destinasi wisata prioritas nasional yang berpotensi untuk menarik dana pusat untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang objek wisata.
- 4) Perlu peningkatan komitmen, kerjasama, dan koordinasi dari semua stakeholders untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat;

- 5) Perlu adanya peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dimana dengan adanya penambahan kewenangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 disertai pula dengan peningkatan alokasi pendanaan baik dalam bentuk DAU maupun DAK. Selain itu peran strategis DAK fisik sebagai bentuk sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah perlu diperbesar alokasinya untuk menutupi celah fiskal yang dimiliki oleh daerah. Disamping itu perlu juga sinkronisasi dan harmonisasi penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik pada skala kecil yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 6) Untuk mengantisipasi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perlu dicari alternatif pembiayaan selain APBD provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur.